

MEMBANGUN INDUSTRI INDONESIA: IDENTIFIKASI MASALAH DAN REFORMASI KEBIJAKAN



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada**

Oleh:
Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D
Yogyakarta, April 2007

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada

Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada

Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Senat Akademika Universitas Gadjah Mada

Rektor, dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada

Para Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota

Para dosen, kolega, sanak keluarga, sahabat, karyawan, mahasiswa, pengusaha

Pejabat pemerintah pusat dan daerah, dan hadirin lainnya

Assalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah melapangkan jalan bagi kita untuk mengikuti Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan acara pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM. Untuk itu, di awal pidato ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Guru Besar atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan, yang berjudul:

"Membangun Industri Indonesia: Identifikasi Masalah dan Reformasi Kebijakan"

Hadirin yang terhormat,

Topik ini saya pilih atas dasar masih belum pulihnya industri Indonesia terutama pascakrisis. Simak ungkapan pelaku industri berikut: "Kalau ada perusahaan garmen atau tekstil tutup atau mem-PHK karyawannya, itu hal biasa di tahun 2003-2006. Kalau ada yang masih bisa *survive*, itu alhamdulillah. Kalau ada yang mampu melakukan ekspansi bisnis, wah...itu ajaib". Ironis dan getir. Demikian jeritan para pelaku bisnis yang bergerak dalam industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Selama 2004-2006 memang pertumbuhan industri TPT hanya 1,2-4,1% (BI, 2007). Keluhan

serupa dijumpai untuk pemain bisnis dalam industri barang dari kayu yang bermuara pada isu sentral, yaitu munculnya gejala deindustrialisasi dan menurunnya daya saing industri.

Masalahnya, apakah industrialisasi di Indonesia telah memiliki landasan yang kokoh? Mungkinkah Indonesia menjadi negara industri baru tahun 2020?

Saya menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan besar di atas tidak mungkin tuntas dalam satu jam. Namun, setidaknya marilah kita coba telusuri bagaimana perjalanan industrialisasi di Indonesia, masalah mendasar yang dihadapi, dan pentingnya reformasi kebijakan industri untuk mewujudkan visi menuju negara industri 2030.

PERAN INDUSTRI MANUFAKTUR

Tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi di Indonesia sejak masa Soeharto hingga saat ini telah mengakibatkan transformasi struktural di Indonesia. Dalam literatur ekonomika pembangunan, transformasi struktur ekonomi suatu negara menunjukkan pola bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri (Chenery, 1979; Chenery & Syrquin, 1975). Tahun 1967 pendapatan per kapita baru mencapai USD75. Ternyata 30 tahun kemudian pendapatan per kapita melonjak hingga mencapai USD 1.023 atau USD 3.690 menurut *purchasing power parity* (PPP), dan pada tahun 2006 diperkirakan sekitar USD 4.000.

Pola perubahan struktur ekonomi Indonesia agaknya sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, di mana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, sementara kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung meningkat (Tabel 1). Pada tahun 1968, sektor pertanian memberi sumbangan sebesar 51% terhadap keseluruhan perekonomian yang mana tertinggi dibandingkan sumbangan yang diberikan sektor lain, misalnya sektor industri manufaktur hanya menyumbang 8,5%. Selewat tahun itu, fenomena yang terjadi ialah sumbangan sektor pertanian berangsur-angsur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proses transformasi struktural nampaknya terus berlangsung. Selama periode 1988-1993, struktur perekonomian Indonesia

mengalami perubahan yang mencolok, di mana sumbangan sektor pertanian terhadap PDB berangsur-angsur dilampaui oleh sumbangan sektor industri manufaktur. Sejak tahun 1993 sumbangan sektor pertanian tidak pernah melebihi sektor industri manufaktur. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sektor pertanian hanya berperan 17,4% terhadap PDB; sementara ekspansi pada hampir semua komoditi industri menyebabkan industri manufaktur menyumbang 23,9% terhadap PDB. Singkatnya, sektor industri manufaktur muncul menjadi penyumbang nilai tambah yang dominan dan telah tumbuh pesat melampaui laju pertumbuhan sektor pertanian. Pada tahun 2005, sektor pertanian hanya menyumbang 13,4% terhadap PDB, sementara sektor industri pengolahan menyumbang 28,1% terhadap PDB.

Industri manufaktur Indonesia memainkan peranan penting sejak kita menyadari tidak bisa mengandalkan ekspor migas. Tabel 2 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur yang semakin berorientasi ekspor telah menopang ekonomi Indonesia. Ekspor industri manufaktur menyumbang sekitar 83-85% terhadap ekspor nonmigas dan sekitar 64-67% terhadap total ekspor Indonesia selama 1994-2005. Bahkan kontribusi ekspor industri ini telah melampaui ekspor sektor pertanian dan migas sejak awal dasawarsa 1990-an. Boleh dikata industri manufaktur menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan sektor industri melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 1994-2004. Sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit, yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1997. Namun, sejak krisis, pertumbuhan sektor industri relatif rendah hanya berkisar antara 3,5% hingga 7,7%.

Dalam sejarah industri Indonesia, setidaknya dikenal empat tahapan pertumbuhan tinggi dan transformasi struktural yang cepat, yang masing-masing memiliki tekanan kebijakan dan tekanan lingkungan internasional yang berbeda (Hill, 1997: 26-31). Pertama adalah periode pertumbuhan yang sangat cepat pada periode tahun 1967-1973 yang disebabkan oleh liberalisasi di segala sektor dan pulihnya kondisi perekonomian. Inflasi menurun dengan cepat, saluran perdagangan dibuka kembali yang menyebabkan pengeluaran konsumsi meningkat tajam dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua adalah periode Bonanza Minyak (*Oil Boom*) pada

periode 1973-1981, yang ditandai dengan industrialisasi yang diarahkan oleh pemerintah, peran BUMN yang menonjol, dan pembiayaan oleh bank-bank pemerintah. Ketiga adalah fase tahun 1981 hingga 1985, harga minyak dunia terus menurun sehingga memaksa pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan industri, terutama investasi di proyek-proyek mega dan industri migas. Baru pada tahun 1985 fase keempat dimulai, pemerintah mengubah investasi pemerintah, campur tangan pemerintah, dan industri substitusi impor menjadi investasi swasta yang berorientasi pasar dan bersifat promosi ekspor. Pada fase tersebut sektor swasta menjadi mesin penggerak utama dari pertumbuhan industri.

DAYA SAING INDUSTRI

Daya saing telah dan akan terus menjadi topik diskusi yang menarik di kalangan ekonom, pelaku bisnis, dan politisi. Boleh dikata “peningkatan daya saing” telah menjadi kata kunci yang sering didengarkan dalam setiap seminar, temu usaha, maupun pidato para pejabat. Ia menjadi obsesi semua orang. Ironisnya, konsepsi mengenai daya saing sering kali kabur dan disalahartikan. Banyak yang mengartikan bahwa daya saing negara sama dengan daya saing produk maupun daya saing perusahaan. Daya saing negara Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada dalam peringkat papan bawah dari sampel negara yang diteliti setiap tahun. Begitu dilaporkan oleh *World Competitiveness Report* dan *Global Competitiveness Report* dalam laporan tahunannya selama 7 tahun terakhir (IMD, 2007; *World Economic Forum*, 2006). Padahal suatu perusahaan yang menghasilkan produk yang memiliki daya saing belum tentu memiliki daya saing untuk semua produk yang dihasilkannya. Demikian juga bila sejumlah perusahaan di suatu negara memiliki daya saing yang tinggi, belum tentu seluruh perusahaan di negara tersebut memiliki daya saing yang tinggi.

Oleh karena itu, beberapa ekonom menentang konsep yang mengatakan bahwa negara bersaing di pasar global persis sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan. Paul Krugman berada pada jajaran paling depan di antara para ekonom yang berpendapat bahwa daya saing suatu negara tidak identik dengan daya saing perusahaan/produk. Ia pernah memperingatkan, jargon 'peningkatan

daya saing' merupakan obsesi yang berbahaya (Krugman, 1994). Ada setidaknya dua alasan: Pertama, dalam realitas, yang bersaing bukan negara, tetapi perusahaan dan industri. Kebanyakan orang menganalogkan daya saing negara identik dengan daya saing perusahaan. Bila negara Indonesia memiliki daya saing, belum tentu seluruh perusahaan dan industri Indonesia memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional. Kedua, mendefinisikan daya saing negara lebih problematik daripada daya saing perusahaan. Bila suatu perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawannya, membayar pasokan bahan baku dari para pemasok, dan membagi deviden, maka perusahaan itu akan bangkrut dan terpaksa keluar dari bisnis yang digelutinya. Perusahaan memang bisa bangkrut, namun negara tidak memiliki *bottom line* alias tidak akan pernah “keluar dari arena persaingan”. Suka atau tidak suka dengan kinerjanya, negara tidak bisa begitu saja keluar dari bisnis. Tidak seperti perusahaan, persaingan antar negara bukan merupakan *zero-sum game*. Negara bersaing di pasar internasional tidak hanya sebagai pesaing, yang hanya untung di atas pengorbanan negara lain. Sebaliknya, ada interdependensi antar negara: sebagai pasar ekspor atau sebagai pemasok barang-barang impor. Krugman, oleh karena itu, menyimpulkan bahwa negara-negara utama di dunia tidak dalam tingkat persaingan yang signifikan satu sama lain. Dengan kata lain, dalam konteks bisnis, persaingan antar produk atau perusahaanlah yang lebih menonjol.

Dalam perdagangan internasional, keunggulan komparatif suatu produk dapat dilihat dari nilai RCA (*Revealed Comparative Advantage*). Konsep RCA pertama kali diperkenalkan oleh Bela Balassa pada tahun 1965. Sejak itu banyak laporan penelitian dan studi empiris menggunakan RCA sebagai indikator keunggulan komparatif suatu produk dan dipergunakan sebagai acuan spesialisasi perdagangan internasional. Konsep RCA yang dipelopori oleh Balassa memang ditujukan untuk mengukur keunggulan relatif suatu produk (Balassa, 1965).

Bagaimana daya saing industri Indonesia di pasar global? Dilihat dari indeks RCA (*Revealed Comparative Advantage*), ternyata tidak berubah. Indeks RCA menunjukkan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas atau sekelompok komoditas suatu negara terhadap

pangsa ekspor komoditas tersebut di dunia. Sejak 1982 keunggulan komparatif Indonesia meningkat pesat dengan pertumbuhan rata-rata 19% per tahun hingga tahun 1994. Tidak berubahnya RCA Indonesia selama 1965-82 besar kemungkinan karena ekspor kita masih didominasi oleh minyak dan produk pertanian yang padat sumberdaya alam (*agricultural and resource-based industries*) (Kuncoro, 2006). Tidak mengherankan, sejak tahun 1983 Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam ekspor produk manufaktur yang padat sumberdaya alam, seperti kayu lapis, dan padat karya, seperti tekstil, garmen, mebel, dan alas kaki (Aswicahyono, 1996; Soesastro, 1998).

Setelah 1982, sejalan dengan upaya pengembangan *broad-base industry*, produk ekspor nonmigas Indonesia semakin beragam. Namun, komoditi industri manufaktur Indonesia yang meningkat pangsa pasarnya di dunia masih didominasi oleh produk berteknologi sederhana seperti karet, plastik, tekstil, kulit, kayu, dan gabus. Ini mencerminkan masih lambatnya proses perubahan struktur ekspor manufaktur, rendahnya divesifikasi produk dan pasar ekspor Indonesia (Tambunan, 2001: 104-6).

Kendati demikian, yang cukup memprihatinkan adalah adanya indikasi mulai melemahnya daya saing Indonesia sejak tahun 1992. Salah satu sebab utamanya adalah masih terkonsentrasinya produk ekspor nonmigas yang tergolong hasil dari industri yang padat sumberdaya alam (NRI) dan berbasis tenaga kerja yang tidak terampil (ULI). Struktur ekspor nonmigas Indonesia telah berubah berdasarkan intensitas input, yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yakni: (a) NRI (*Natural Resource Intensive*), (b) ULI (*Unskilled Labour Intensive*), (c) PCI (*Physical Capital Intensive*), (d) HCI (*Human Capital Intensive*), dan (e) TI (*Technological Intensive*). Tabel 3 menjelaskan struktur ekspor nonmigas Indonesia menurut klasifikasi tersebut.

Agaknya Indonesia harus mulai bersiap-siap menyongsong tahapan keunggulan komparatif yang lebih tinggi, yaitu ke sektor padat teknologi (TI) dan padat tenaga ahli (HCI). Ini terbukti di kala pertumbuhan ekspor nonmigas kita mengalami penurunan selama 1993-1995, produk yang justru menanjak pertumbuhannya (setidaknya pertumbuhan nilai ekspornya 50% dan nilai ekspornya minimum US\$ 100 juta) adalah produk dari industri TI dan HCI. Di

antara produk ekspor yang naik daun adalah barang-barang elektronik, kimia dan mesin nonelektronik termasuk peralatan telekomunikasi, komputer dan komponennya. Menariknya, hampir semua produk tersebut memiliki rasio impor kurang dari 1, yang menunjukkan betapa produk-produk tersebut tidak memiliki kadar kandungan impor yang tinggi.

Sayangnya, ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997-1999, peranan industri manufaktur terhadap total ekspor mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Banyak perusahaan industri terpaksa mem-PHK buruhnya, mengurangi kapasitas produksi, dan tidak sedikit yang terpaksa menutup usahanya. Gejala deindustrialisasi mulai terlihat di sentra-sentra industri utama khususnya di pulau Jawa (Kuncoro, 2007: bab 16). Mari kita simak beberapa masalah mendasar yang dihadapi oleh industri Indonesia, terutama pasca krisis ekonomi.

Hadirin yang terhormat,

MASALAH DUALISME INDUSTRI

Strategi industrialisasi yang banyak mengandalkan akumulasi modal, proteksi, dan teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan dualisme dalam proses pembangunan. Fakta menunjukkan sektor manufaktur yang modern hidup berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisional dan kurang produktif. Dualisme dalam sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan rumah tangga (IKRT) yang berdampingan dengan industri besar dan menengah (IBM) (Kuncoro, 2006: bab 9). Industri kecil didefinisikan sebagai perusahaan yang mengkaryakan 5-19 pekerja. Industri rumah tangga didefinisikan sebagai perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 5 pekerja. Industri menengah didefinisikan sebagai perusahaan yang mempekerjakan antara 20-99 pekerja. Industri besar adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 99 pekerja.

Tabel 4 menunjukkan bahwa IKRT memiliki peranan yang cukup besar dalam industri manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang nilai *output*. Pada tahun 2002, dari total unit usaha manufaktur di Indonesia sebanyak 2,692 juta, ternyata 99,2 % merupakan unit usaha IKRT. IKRT, dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, mampu menyediakan kesempatan kerja sebesar 59,3 % dari total

kesempatan kerja. Kendati demikian, sumbangan nilai *output* IKRT terhadap industri manufaktur hanya sebesar 17,8 %. Pola ini cenderung sama dari tahun ke tahunnya (1997-2004). Banyaknya jumlah orang yang bekerja pada IKRT memperlihatkan betapa pentingnya peranan IKRT dalam membantu memecahkan masalah pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan.

Di lain pihak, industri besar dan menengah (IBM) memberikan kontribusi yang dominan dari sisi nilai *output*. Pada tahun 1997, IBM menyumbang 91% dari keseluruhan nilai *output*, menyerap sekitar 39% dari total kesempatan kerja, namun hanya menyumbang 0,8% dari total unit usaha yang ada. Pada tahun 2002, IBM menyumbang 91,5% dari keseluruhan nilai *output*, menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 40% dari total kesempatan kerja, namun hanya menyumbang 0,8% dari total unit usaha yang ada.

Hadirin yang saya muliakan,

MASALAH KETIMPANGAN INDUSTRI SECARA GEOGRAFIS

Salah satu permasalahan struktural industri adalah terkonsentrasinya lokasi industri manufaktur di Jawa dan Sumatra. Dominasi sebagian besar aktifitas industri manufaktur moderen, terutama IBM, di Indonesia terus berlangsung di pulau Jawa dan Sumatra selama 1976-2004. Jawa dan Sumatra menyerap lebih dari 93 persen tenaga kerja Indonesia selama periode tersebut. Pangsa tenaga kerja dari Jawa cenderung agak menurun, sedangkan pangsa Sumatra cenderung naik secara substansial. Pangsa Jawa turun dari 89 persen pada tahun 1976 menjadi 79 persen pada tahun 2004. Pangsa Sumatra tumbuh dari 6,7 menjadi 14,1 persen dalam periode yang sama. Pulau-pulau utama lain di Indonesia kurang memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia. Bahkan jika kita menjumlahkan pangsa Kalimantan, Sumatra, dan Pulau-pulau di KTI (Kawasan Timur Indonesia) terhadap tenaga kerja Indonesia hanya sekitar 4 persen pada 1976 dan 7 persen pada 2004 (lihat Tabel 5).

Seberapa jauh perkembangan kesenjangan distribusi geografis aktivitas industri manufaktur dapat dianalisis dengan menerapkan indeks entropi Theil (Kuncoro, 2002: bab 4; Kuncoro, 2007: 293).

Gambar 2 menunjukkan fenomena menarik: Pertama, indeks entropi total memberikan indikasi sangat tingginya konsentrasi spasial selama periode 1976-2001. Rata-rata indeks total entropi Indonesia adalah sekitar 2,5 dalam periode tersebut. Angka rata-rata ini jauh lebih tinggi dari pada angka indeks entropi untuk negara maju dan berkembang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Theil & Chen (1996) terhadap lebih dari 100 negara di AS, Eropa Barat, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan, di mana nilai indeks entropi berkisar antara 0,53 hingga 0,65 selama periode 1980-1985.

Aspek spasial tetap merupakan *blind spot* bagi ilmu ekonomi arus utama karena ketidakmampuan para ekonom untuk menciptakan model yang menjelaskan berbagai macam aspek lokasi industri. Tumbuhnya kesadaran mengenai terbatasnya daya penjelas teori-teori lokasi yang tradisional dalam menganalisis geografi ekonomi telah mendorong munculnya paradigma baru yang disebut **geografi ekonomi baru** (*new economic geography* atau *geographical economics*) (Fujita & Thisse, 1996). Dewasa ini, semakin banyak jumlah ekonom yang tertarik dengan studi masalah lokasi (Krugman, 1995; Lucas, 1988). Tentu ini mendorong berkembangnya alat-alat analisis baru, yang membuat kontribusi menarik dan penting bagi ekonomika geografi.

Adalah Paul Krugman, yang telah membuka misteri (*blackbox*) eksternalitas ekonomis dan secara eksplisit memasukkan dimensi spasial dan semangat “proses kumulatif” dalam deskripsi pembangunan perkotaan dan regional (Krugman, 1996). Krugman mencoba menjelaskan mengapa terjadi konsentrasi spasial di kota-kota besar di negara sedang berkembang. Perbedaan antara karya Krugman dan karya terbaru dalam geografi ekonomi atas pembangunan daerah tidak terbatas pada struktur industri dan eksternalitas, tetapi juga diperluas pada pertanyaan transaksi yang tidak melalui pasar dan cara bagaimana meningkatnya kekuatan produsen besar dikaitkan dengan lokalisasi industri secara kontemporer (Martin & Sunley, 1996).

Hampir senada dengan Krugman, meskipun dengan perspektif yang berbeda, Michael Porter, mahaguru dari Harvard University, menekankan pentingnya peranan teknologi, strategi/organisasi, dan geografi ekonomi dalam proses inovasi dan upaya menjaga

keunggulan kompetitif perusahaan secara berkelanjutan (Porter & Solvel, 1998). Porter berpendapat bahwa derajat pengelompokan industri secara geografis dalam suatu negara memainkan peranan penting dalam menentukan sektor manakah yang memiliki keunggulan kompetitif pada skala internasional (Porter, 1990). Dewasa ini, ia mengajukan hipotesis menarik bahwa kluster industri, yang ditandai dengan konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi yang saling berkaitan satu sama lain pada suatu bidang tertentu, agaknya jauh lebih produktif dilihat dari sudut organisasi industri (Porter, 1998). Di Amerika Serikat, misalnya, beberapa contoh historis dari kluster industri ini adalah industri *chip* komputer di Silicon Valley, industri film di Hollywood, industri mode di New York City, industri mobil di Detroit, dan industri elektronika di Southern California.

Singkatnya, paradigma baru yang muncul dalam analisis spasial adalah mengkombinasikan pendekatan ilmu ekonomi dan geografi, atau disebut geografi ekonomi (lihat *Gambar 3*). Ilmu ekonomi arus utama (*mainstream economics*) memang cenderung mengabaikan dimensi “ruang” atau “spasial”. Dengan kata lain, ekonomi arus utama cenderung aspasial (*spaceless*). Ini terlihat dari inti analisis ekonomi konvensional yang cenderung menjawab pertanyaan ekonomi seputar *what to produce* (aktivitas konsumsi), *how to produce* (aktivitas produksi), dan *for whom to produce* (aktivitas distribusi).

Geografi merupakan studi mengenai pola spasial di atas permukaan bumi, yang menjawab pertanyaan *where* (di mana aktivitas manusia berada) dan *why* (mengapa lokasi perusahaan/industri berada di situ). Dalam perspektif geografi ekonomi, aspek pola spasial aktivitas ekonomi menjadi pusat perhatian utama dengan digunakannya Sistem Informasi Geografi (Kuncoro, 2001) dan menjawab pertanyaan sentral dalam ekonomi regional, yaitu “di mana” (*where*) lokasi industri berada dan “mengapa” (*why*) terjadi konsentrasi geografis industri manufaktur (Fujita, et al. 1999).

Peranan wilayah sub-nasional, yaitu apakah kabupaten dan kota dalam mempengaruhi lokasi aktifitas ekonomi, nampaknya semakin penting dalam studi geografi ekonomi. Berbagai studi dalam

bidang sosial-ekonomi dan perubahan sosial menekankan semakin pentingnya daerah dan peran barunya sebagai pelaku ekonomi dalam konfigurasi baru pola pembangunan spasial (Rodriguez-Pose, 1998: bab 3). Ohmae dengan lantang berpendapat bahwa dalam dunia tanpa batas, *region state* akan menggantikan negara bangsa (*nation states*) sebagai pintu gerbang memasuki perekonomian global (Ohmae, 1995). Porter (1990) mempertanyakan peran negara sebagai unit analisis yang relevan dengan mengatakan bahwa “para pesaing di banyak industri, dan bahkan seluruh kluster industri, yang sukses pada skala internasional, ternyata seringkali berlokasi di suatu kota atau beberapa daerah dalam suatu negara”.

Hadirin yang berbagai,

MASALAH KETENAGAKERJAAN

Di pasar tenaga kerja, setidaknya ada tiga masalah mendasar yang muncul (Kuncoro, 2006). Pertama, tingkat pengangguran meningkat pesat pasca krisis ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 6,1% atau 5,8 juta penganggur pada tahun 2000 menjadi 10,3% atau sekitar 10,3 juta penganggur pada tahun 2005. Ini belum terhitung tak kurang 30 juta orang yang termasuk setengah menganggur karena bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata yang hanya 4,5% selama 2000-2005 terbukti tidak mampu menyerap angkatan kerja baru sekitar 2-2,5% per tahun. Jumlah pekerja di sektor formal mengalami penurunan sejak tahun 2000 karena penciptaan lapangan kerja sektor formal relatif stagnan. Penciptaan tenaga kerja hanya bersumber dari sektor informal, yang kebanyakan mengandalkan tenaga kerja *low skill, low paid*, dan tanpa proteksi sosial.

Kedua, permasalahan regulasi ketenagakerjaan dan penetapan kontrak adalah masalah terpenting yang berkaitan dengan iklim investasi. Studi Bank Dunia (2006) menunjukkan betapa regulasi ketenagakerjaan dan penetapan kontrak Indonesia tidak kompetitif dibanding negara Asia lain. Biaya pemecatan (termasuk pesangon) Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Para pengusaha mengeluh besarnya pesangon yang harus dibayarkan bila melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yakni mencapai 9 bulan gaji.

Akibatnya, perusahaan lebih senang menarik karyawan kontrak daripada tetap.

Ketiga, pemutusan hubungan kerja sektor riil, khususnya industri yang padat karya, terus berlangsung. Sejak kenaikan BBM bulan Oktober 2005, setidaknya 467 perusahaan tekstil dan garmen anggota API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) sudah menutup usahanya. Bila rata-rata minimal ada 100 pekerja yang dikaryakan oleh anggota API, kita bisa menghitung berapa tambahan barisan penganggur baru akibat ditutupnya perusahaan. Demikian juga anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang menaksir angka PHK akan mencapai 600.000 orang pada tahun 2006. Ini belum terhitung anggota asosiasi dan sektor lain yang terpaksa merumahkan karyawan, mengurangi jumlah karyawan tetap dan kontrak akibat kenaikan berbagai biaya dan “rugi kurs”.

MASALAH STRUKTURAL

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) versi pemerintah SBY-JK, daftar permasalahan struktural industri Indonesia makin panjang. Industri manufaktur Indonesia menghadapi masalah struktural sebagai berikut: Pertama, masih sangat tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri, yang berkisar antara 28-30 persen antara tahun 1993-2002. Inilah yang barangkali menjelaskan mengapa melemahnya nilai rupiah terhadap dolar tidak langsung menyebabkan kenaikan ekspor secara signifikan.

Kedua, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe “tukang jahit” dan “tukang rakit”. Ini terlihat jelas dalam industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan industri elektronika. Padahal kedua sektor ini merupakan industri yang padat karya. Meningkatnya upah minimum di berbagai daerah Indonesia menyebabkan Indonesia mulai kehilangan pijakan untuk industri yang berbasis buruh murah. Hengkangnya perusahaan asing ke China dan Vietnam makin sering diberitakan.

Masalah struktural berikutnya adalah rendahnya kualitas SDM, sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja industri, menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja industri. Selain itu, belum terintegrasinya UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar dan kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati “monopoli”, setidaknya oligopoli, menambah panjang daftar masalah struktural yang dihadapi industri Indonesia.

Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia (misal Kuncoro, *et al.* 2004; Kuncoro & Isfandiarni, 2006; LPEM FEUI, 2000; SMERU, 1999, 2001). Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak “pro-bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman (Kuncoro, *et al.* 2004). Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat), perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja.

Kekhawatiran para pelaku industri makin bertambah karena dibebani berbagai kenaikan tarif dan pajak. Kenaikan harga BBM, tarif listrik, telpon, angkutan, dan harga bahan baku pada tahun 2002-2005 terbukti semakin "mencekik leher" industri manufaktur. Kondisi lingkungan bisnis domestik cenderung mengakibatkan daya saing produk nasional semakin merosot. Peta masalah dan usulan reformasi iklim investasi di Indonesia telah banyak dianjurkan (misal Kuncoro, 2006; Ray, 2003; SMERU, 1999, 2001).

Hadirin yang saya hormati,

MENGEMBANGKAN DAYA SAING BERBASIS KLUSTER DAN KOMPETENSI INTI

Menyimak berbagai masalah yang dihadapi oleh industri Indonesia, bagaimanakah seharusnya strategi yang dipilih untuk mengatasi, minimal menguranginya?

Literatur mengenai ekonomika industri dan geografi industri setidaknya memiliki tiga paradigma, yaitu RBV, (*Resource-based View*), analisis industri (I/O), dan paradigma sistem produksi (lihat Gambar 4). Paradigma RBV memfokuskan pada pengembangan atau perolehan sumber daya (*resources*) dan kapabilitas (*capabilities*) yang khas dan sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Paradigma RBV berpendapat bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan jauh lebih penting daripada struktur industri dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Paradigma ini memandang perusahaan (organisasi) sebagai sekumpulan aset dan kapabilitas. Aset dan kapabilitas suatu perusahaan akan menentukan efisiensi dan efektifitas setiap pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Paradigma RBV memandang bahwa beberapa aset (sumber daya) kunci tertentu akan memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan ditentukan oleh jenis, jumlah dan, sumber daya dan kapabilitas yang ada.

Model RBV berpendapat bahwa *Core Competencies* merupakan basis keunggulan kompetitif perusahaan, keunggulan stratejik, dan kemampuan untuk memperoleh *Above-average Returns*. *Core Competencies* adalah sumberdaya dan kapabilitas yang dapat menjadi sumber *Competitive Advantage*.

Menurut model I/O, *above-average returns* bagi perusahaan sangat ditentukan oleh karakteristik di luar perusahaan. Model ini memfokuskan pada struktur industri atau daya tarik lingkungan eksternal, dan bukan karakteristik internal perusahaan. Para peneliti I/O meneliti berbagai hubungan tersebut dalam usahanya untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa terjadi perbedaan dalam kinerja organisasi yang berbeda. Pendekatan ini berusaha melakukan identifikasi dan mengevaluasi industri dan kekuatan-kekuatan persaingan yang mempengaruhi sebuah organisasi dengan melihat berbagai macam faktor lingkungan eksternal.

Perhatian utama dari pendekatan I/O adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat bersaing dengan pesaingnya. Pendekatan I/O juga menyatakan bahwa keunggulan kompetitif berhubungan dengan posisi kompetitif (*competitive positioning*) dalam sebuah industri. Posisi perusahaan dalam industri dan karakteristik industri yang ada

akan menentukan potensi profitabilitasnya. Hal ini berarti bahwa jika terdapat banyak kekuatan yang negatif dalam sebuah industri, atau perusahaan memiliki posisi yang lemah dalam sebuah industri, maka profitabilitasnya akan lebih rendah dari rata-rata. Sebaliknya, jika sebuah industri menawarkan berbagai macam kesempatan yang signifikan, atau sebuah perusahaan memiliki posisi yang kuat dalam sebuah industri, maka profitabilitasnya akan berada di atas rata-rata.

Pendekatan populer dalam analisis model I/O adalah SCP (*Structure Conduct Performance*). Terdapat dua asumsi dalam pendekatan SCP, yakni: (1) Hubungan yang stabil dan adanya arah kausalitas dari struktur-perilaku- kinerja; (2) Pendekatan SCP berawal dari premis bahwa pengukuran kekuatan pasar dapat dihitung dari data yang tersedia (Martin, 1999; Kuncoro, 2007).

Konsep hubungan SCP menjelaskan bagaimana perusahaan akan berperilaku (*conduct*) dalam menghadapi struktur pasar tertentu dalam suatu industri yang mana dari perilaku tersebut, akan tercipta suatu kinerja (*performance*) tertentu yang mana perbedaan struktur dan perilaku ini akan mempengaruhi kinerja yang tercermin dalam harga, efisiensi dan tingkat inovasi. Hubungan tersebut bila digambarkan dalam Gambar 5.

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa struktur dan perilaku saling mempengaruhi. Struktur dan perilaku saling berinteraksi yang nantinya akan berdampak terhadap usaha penjualan yang merupakan elemen dari perilaku yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap permintaan. Struktur dan perilaku akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang mana akhirnya akan berpengaruh terhadap laba yang merupakan tujuan utama dari setiap industri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa hubungan SCP tidak hanya merupakan hubungan linier tetapi juga merupakan hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi (Martin, 1994: 7).

Pendekatan lain yang digunakan dalam paradigma analisis industri adalah pendekatan lima kekuatan. Porter (1985) mengajukan model lima kekuatan (*five forces model*) sebagai alat untuk menganalisis lingkungan persaingan industri. Lima kekuatan persaingan tersebut adalah: (1) Persaingan antarpesaing dalam industri yang sama; (2) Ancaman untuk memasuki pasar bagi

pendatang baru; (3) Ancaman barang substitusi; (4) Daya tawar pembeli; (5) Daya tawar para pemasok bahan baku.

Paradigma ketiga adalah “sistem produksi”, yang merupakan bentuk integrasi lokasi di antara perusahaan-perusahaan yang kemudian membentuk jejaring. Sistem produksi sangat berpengaruh terhadap produksi, dan rantai nilai tambah. Perlu diketahui bahwa sistem produksi perusahaan tergambar dalam kronologi perkembangan geografi industri. Geografi industri inilah yang kemudian menjadi fokus dari teori neoklasik. Banyak penelitian yang berhubungan dengan produksi, komoditas atau rantai nilai tambah (*value-added chains*) (Hayter, 2000; Porter 1990). Walaupun berhubungan dengan paradigma analisis industri, namun rantai nilai tambah secara eksplisit lebih fokus pada jejaring dari perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Menurut Porter (1998), peta ekonomi dunia saat ini didominasi oleh kluster (*cluster*), yaitu konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berkaitan dalam suatu bidang tertentu. Kluster mencakup susunan dari industri yang berkaitan dan entitas lainnya yang penting dalam kompetisi. Dalam kasus kluster *California wine* di Amerika Serikat, entitas pendukung yang ekstensif meliputi pemasok stok anggur, perlengkapan irigasi dan panen, teknologi irigasi, fasilitas proses *wineries*, intitusi pendidikan, penelitian, dan perdagangan, sampai kluster turisme dan kluster rumah makan (Kuncoro, 2006: 30-32).

REFORMASI KEBIJAKAN INDUSTRI

Kebijakan industri, yang diformulasikan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), selama pemerintahan Soeharto menitikberatkan pada: (1) industri-industri yang menghasilkan devisa dengan cara memproduksi barang-barang substitusi impor; (2) industri-industri yang memproses bahan-bahan mentah (industri dasar) dalam negeri dalam jumlah yang besar; (3) industri-industri padat karya; (4) perusahaan-perusahaan negara untuk tujuan strategis dan politis (Prawiro, 1998: 155; Soehoed, 1988). Negara telah terlibat dalam industri-industri manufaktur sebagai investor, pemilik, pengatur, dan pihak yang membiayai. Di antara negara-negara Asia, gaya “*development state*” semacam ini bukanlah cerita yang baru. Kendati demikian, interpretasi neoliberal tentang Indonesia

menunjukkan bahwa kebijakan industri dinilai tidak koheren karena dibayangi para pemburu rente (*rent seeking*), dan tidak relevan dengan pembangunan dan keberhasilan ekspor Indonesia. Dalam masa Soeharto terjadi perubahan orientasi kebijakan industri, dari orientasi *inward-looking* menjadi *outward-looking*. Bila disimak lebih dalam, di bawah kepemimpinan Soeharto periode kebijakan industri meliputi periode rehabilitasi dan stabilisasi (1967-1972), periode boom minyak (1973-1981), periode penurunan harga minyak (1982-1985), dan periode krisis (1997).

Pasca presiden Soeharto, terjadi perubahan orientasi kebijakan industri (Kuncoro, 2007: bab 4-5). Setelah Soeharto digantikan oleh Presiden Habibie pada tahun 1998, jenis kebijakan industrinya berubah menjadi periode pemulihan krisis. Selama masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati, kebijakan industri yang diterapkan adalah revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri, serta mulai menerapkan pendekatan kluster. Orientasi kebijakan pun berubah antara *inward* and *outward-looking*.

Hill (1997: 18), guru besar Australian National University, tegas mengatakan bahwa Indonesia menempuh kebijakan intervensi industri yang salah arah. Alasannya, sektor perusahaan besar milik negara, secara tidak efisien menggunakan sumber daya yang seharusnya dapat dipergunakan dengan lebih produktif di tempat lain; komitmen yang besar terhadap industri berteknologi tinggi (walaupun tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan), sementara perluasan industri-industri dasar dan jasa-jasa pendukung mengalami kekurangan sumber daya; sistem peraturan dan perijinan yang berbelit-belit yang seolah-olah dirancang untuk mencapai tujuan nasional; dan program pengembangan perusahaan-perusahaan kecil dan program subkontrak yang diwajibkan selama lebih dari 20 tahun telah mengakibatkan dampak yang kecil dalam efisiensi atau pemerataan.

Tiadanya GBHN dan LOI (*Letter of Intent*) menuntut pemerintah untuk menjelaskan bagaimana arah perubahan yang akan ditempuh. Kita perlu belajar dari kebijakan industri negara lain yang telah sukses melakukan industrialisasi. Tabel 6 meringkas perbandingan visi dan arah kebijakan industri di negara-negara Asia.

Di masa SBY-JK, visi kebijakan industri adalah “pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara industri baru”. Dalam kebijakan perkembangan industri nasional dicantumkan sasaran kualitatif dalam jangka menengah (2004-2009) dan jangka panjang (2010-2020). Sasaran pembangunan industri dalam jangka panjang mencakup: (1) kuatnya industri yang memiliki daya saing berkelanjutan; (2) kuatnya struktur industri manufaktur, terutama antara industri kecil-menengah (IKM) dan industri besar; (3) seimbangnyasumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan industri besar; (4) terdistribusinya industri ke seluruh wilayah tanah air (Departemen Perindustrian, 2005: 10-11).

Dalam konteks inilah, saya menekankan pentingnya perspektif baru dalam kebijakan “*targeting*” industri. Perdebatan yang terus berlangsung dalam kebijakan industri adalah mengenai efektifitas intervensi pemerintah yang selektif dalam membantu pertumbuhan industri (misal: Grant, 1995; Pack, 2000). Secara umum, kebijakan industri dapat diklasifikasikan ke dalam upaya *sektoral* dan *horisontal* (Cowling, 1999). Upaya sektoral terdiri dari berbagai macam tindakan yang dirancang untuk menargetkan industri-industri atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Upaya horisontal dimaksudkan untuk mengarahkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan kerangka persaingan di mana perusahaan-perusahaan melaksanakan usahanya. Agaknya di masa mendatang kita memerlukan kebijakan industri yang lebih “antisipatif” atau “pro-aktif” dalam menghadapi banyak perubahan dalam lingkup nasional maupun internasional.

Disertasi saya membuktikan bahwa pilihan kebijakan industri ini telah menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat pada usaha IBS dengan konsentrasi secara spasial di Jawa-Sumatra-Bali dan cenderung terkonsentrasi di daerah kota metropolitan (Kuncoro, 2002). Bahkan deregulasi dan liberalisasi sejak pertengahan 1980-an telah terbukti memperkuat konsentrasi spasial di Indonesia (Kuncoro, 2000).

Inilah pentingnya melakukan reformasi kebijakan industri nasional. Kebijakan industri “tradisional” sering kali dihubungkan dengan penentuan target sektor-sektor dan industri tanpa menghiraukan di mana sektor-sektor tersebut berlokasi dalam sebuah

negara. Harus diakui, kebijakan industri kita selama ini bersifat aspasial (*spaceless*), mengabaikan di mana lokasi industri berada. Sebaliknya, perspektif baru kebijakan industri lebih mendukung tindakan-tindakan horisontal dan menolak target sektoral. Dalam konteks ini, perspektif spasial pembangunan industri, dengan berbasis kluster, merupakan salah satu faktor kunci yang dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan industri. Literatur mengenai kluster industri mengajarkan bahwa ciri penting dan utama dari suatu kluster adalah konsentrasi geografis dan spesialisasi sektoral. Dengan kata lain, kluster merujuk pentingnya spesialisasi dalam suatu daerah geografis yang berdekatan. Kendati demikian, pengamatan yang lebih rinci terhadap berbagai studi mengenai kluster industri menunjukkan bahwa ada perbedaan yang substansial antarkluster dilihat dari struktur kelembagaan, tingkat kepemilikan dan koordinasi, asal serta evolusinya.

Sayangnya, kendati RPJMN sudah mengidentifikasi permasalahan struktural industri Indonesia, nampaknya belum secara eksplisit memasukkan pendekatan kluster. RPJMN hanya menjelaskan arah pengembangan industri manufaktur adalah mendorong terwujudnya peningkatan utilisasi kapasitas, memperluas basis usaha dengan penyederhanaan perijinan dan peningkatan peran UKM, meningkatkan iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan, memperluas penerapan standardisasi produk industri, dan mendorong perkuatan struktur industri pada subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

Dengan harapan dan mandat yang besar dari rakyat dan warisan kinerja makroekonomi yang membaik selama periode Megawati (Aswicahyono & Hill, 2004), pemerintah SBY-JK memiliki peluang emas untuk melakukan perubahan mendasar bagi Indonesia. Pertama, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Untuk itu, diperlukan perbaikan iklim investasi dan mengembalikan kepercayaan dunia bisnis. Lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertikal (antara pemerintah pusat-propinsi-kabupaten/kota) dan pada tingkat horisontal (antar kementerian dan badan lainnya), terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar berkaitan dengan

perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia, yang mencakup setidaknya reformasi berikut ini:

1. Reformasi pelayanan investasi. Dalam hal prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perijinan, dan 'lampu hijau' dari BKPM atau BKPMD untuk tahap awal. Tahap perijinan dan implementasi proyek investasi sering tertunda karena untuk melakukan bisnis di Indonesia butuh 168 hari dengan biaya yang dapat mencapai rata-rata 14,5% dari rata-rata pendapatan (WB, 2003). Pada akhir tahun 2006, Indonesia telah mengurangi jumlah hari dalam mendirikan usaha baru dari 151 hari hingga ke 97 hari dengan mempercepat persetujuan dokumen-dokumen perusahaan di Kementerian Kehakiman; namun, Indonesia tetap merupakan tempat yang penuh tantangan untuk berusaha dengan urutan 135 dari 175 negara, yaitu berada di kuartal terakhir (WB, 2007). Koordinasi antar tingkatan pemerintahan, baik vertikal maupun horisontal, sangatlah penting. Rencana diterbitkannya Peraturan Presiden tentang "*one stop service*" dan RUU penanaman modal amat dinanti kehadirannya. Kendati demikian, banyak pemda mengkhawatirkan langkah ini sebagai upaya pemerintah pusat untuk melakukan resentralisasi dan mencabut kewenangan dalam pemberian ijin investasi.
2. Tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha: penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perijinan. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus barang & jasa tapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi. Prioritas perlu diberikan pada deregulasi dan koordinasi berbagai peraturan daerah dan pusat. Selain itu, pengalaman China menarik modal asing perlu kita kaji apakah menarik untuk dicoba (Kuncoro, 2004). Di China, untuk perijinan cukup menghubungi Kantor Investasi Asing. Untuk investasi minimal sebesar US\$30 juta, aplikasi investasi harus mendapat ijin dari pusat. Namun di bawah jumlah itu, cukup menghubungi Kantor Investasi Asing di daerah. Waktu persetujuan investasi asing maksimal 3 hari. Bila lebih dari 3 hari tidak ada pemberitahuan dari kantor ini,

otomatis permohonan investasi dianggap diterima. Selain itu, modal asing diperkenankan memiliki aset antara 50 hingga 70 tahun.

3. Reformasi peraturan dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemda. Beberapa masalah pengawasan yang muncul dengan sistem saat ini adalah: (1) tidak semua Perda diserahkan kepada pemerintah pusat; (2) proses *review* Perda dinilai lambat karena dibebankan kepada pemerintah pusat; (3) banyak pemda mengabaikan aturan mengenai Perda bermasalah. Oleh karena itu, agenda reformasi yang perlu dilakukan adalah: pemerintah provinsi diberi kepercayaan dan wewenang untuk: (1) mengkaji semua Perda dari pemda kabupaten/kota di wilayahnya; (2) bekerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi lain dalam mengembangkan prosedur dan standar pengkajian Perda.

Perubahan mendasar kedua, para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masih berperilaku sebagai PREDATOR dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Ini tantangan besar bagi presiden SBY dan kabinetnya. Bila mau meningkatkan kinerja ekspor dan menumpas korupsi, maka disarankan: "membersihkan" jalan raya, pelabuhan, beacukai, dan kepolisian dari berbagai bentuk *grease money*. Beberapa aksi berdasarkan survei untuk kabinet SBY-JK dan pemerintah daerah di Indonesia telah dianjurkan oleh Kuncoro, *et al.* (2004). "*Grease money*", implementasi EDI, berbagai perijinan usaha (contoh ETPIK, berbagai perijinan di daerah), dan peraturan upah minimum regional ditemukan sebagai masalah kunci pada era otonomi daerah. Hampir dua tahun setengah pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla telah berlalu, namun dunia usaha masih diwarnai ekonomi biaya tinggi. Berbagai kebijakan—seperti kenaikan harga BBM yang rata-rata lebih dari 120%, kenaikan suku bunga, dan kenaikan upah minimum—telah memukul dunia usaha, baik besar maupun kecil.

Menyadari hal ini, pemerintah mengeluarkan Inpres No.3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Pada tanggal 18 Desember 2006 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono telah memaparkan hasil pemantauan pelaksanaan Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan

Iklim Investasi untuk periode implementasi sampai dengan bulan Desember 2006. Dalam delapan bulan pertama (Maret s/d Desember 2006) pelaksanaan Inpres No. 3/2006, dari 85 tindakan/keluaran yang harus diselesaikan, hanya 35 tindakan dinyatakan selesai, 15 masih belum dapat diselesaikan sesuai sararan waktu (*pending*), dan 35 berlanjut (lihat Tabel 7). Dengan kata lain, dihitung dari total 50 tindakan yang sesuai jadwal, 35 tindakan yang selesai sama dengan 71% tindakan. Meskipun 15 tindakan/keluaran belum dapat diselesaikan secara tepat waktu, sejumlah tindakan di antaranya telah mencapai kemajuan yang berarti namun sejumlah tindakan lainnya memerlukan perhatian yang lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya.

Perubahan mendasar ketiga, diperlukan rencana reformasi yang komprehensif dan berjangka menengah, setidaknya 5 tahun ke depan. Memang sudah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007. Khusus tentang industri, PP ini hanya mencanangkan program peningkatan daya saing industri manufaktur (Kuncoro, 2007: bab 17, Tabel 17.11). Padahal untuk mencapai Negara Industri Baru 2020 agaknya perlu banyak menjawab masalah struktural yang dihadapi industri Indonesia dan perlu tahapan strategis yang lebih fundamental agar dapat mencapai bangunan industri yang diinginkan. Belajar dari perencanaan pembangunan nasional di masa lalu, setidaknya dikenal beberapa kecenderungan:

1. Belum dimasukkannya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan. Seolah-olah kita hidup dalam dunia 'aspasial' (*spaceless*), di mana faktor perbedaan masalah dan potensi antar kecamatan, kabupaten, dan kota dianggap tetap dan seragam. Perlu dicatat bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak merata dirasakan antardaerah. Pada saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi -13,1% pada tahun 1998, terbukti propinsi Irian Jaya tumbuh 12,7%, demikian juga dengan Batam yang mengenyam pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%. Jelas bahwa country risk tidak identik dengan regional risk, resiko melakukan bisnis di daerah. Memang sudah ada RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah). Namun RUTRW nampaknya dalam praktek

lebih banyak dilanggar karena pertimbangan jangka pendek yang pragmatis.

2. Pendekatan sektoral masih lebih menonjol daripada regional. Di masa pemerintah Soeharto, ini jelas tampak dengan dominannya penerapan asas dekonsentrasi dan orientasi sektoral. Pendekatan semacam ini sah-sah saja karena paradigma sentralisasi amat kuat. Tak dapat dipungkiri, yang terjadi adalah pembangunan 'di daerah', dengan inisiatif, petunjuk, dan dana dari pusat. Budaya Bimas (bimbingan melulu dari atas), Inmas (instruksi melulu dari atas), dan tuntas (tuntunan dari atas) sudah mengakar di benak dan praktek sehari-hari para birokrat di daerah. Di era otonomi daerah sejak tahun 2001, harusnya paradigma 'membangun daerah' lebih difokuskan (Kuncoro, 2004). Artinya, daerahlah yang harus punya inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Asumsinya, daerah lebih tahu tentang masalah dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Implikasinya, Pemerintah pusat tidak bisa menjalankan perencanaan “cetak biru”, yang seragam untuk seluruh daerah, tapi harus mempertimbangkan perbedaan potensi dan masalah antardaerah, dan dampak aktivitas ekonomi antardaerah (*regional spillovers*). Selain itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi strategi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Belum dianutnya perencanaan antisipatif terhadap berbagai macam “gangguan” (*disruption*), baik karena alam (tsunami, gempa, banjir) maupun manusia (misal: bom, kebakaran). Dalam ilmu perencanaan, ini disebut perencanaan interaktif yang memahami perlunya menjadi fleksibilitas terhadap keadaan yang terus menerus berubah (Kuncoro, 2004: bab 3). Pendekatan ini merupakan solusi ketidakefektifan perencanaan dampak di daerah-daerah yang mengalami kontraksi perekonomian (laju pertumbuhan negatif, deindustrialisasi, dan banyak pengangguran). Sekaligus juga adanya kesadaran bahwa perencanaan harus mengantisipasi dampak dan bukan bereaksi atas dampak yang

muncul. Pendekatan ini mempertimbangkan kekuatan semua sektor ekonomi, mengantisipasi prospek penurunan kinerja ekonomi daerah, merencanakan proyek ekonomi yang potensial, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dan pemimpin masyarakat untuk melakukan aksi apa pun di daerah.

Dengan reformasi seperti ini diharapkan akan terjadi perubahan iklim investasi dan implementasi pembangunan di Indonesia. Presiden SBY pun menyadari adanya lima kunci sukses kabinet, yaitu adanya kejelasan visi, kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang efektif, manajemen yang baik, serta pemerintahan yang baik. Visi SBY untuk membangun dunia usaha yang adil, sehat, dan berkembang (Yudhoyono, 2004), perlu ditindaklanjuti dengan strategi dan langkah nyata sebagaimana diusulkan di atas. Semoga harapan perubahan yang diinginkan rakyat tidak hanya sekedar angin surga dan visi 2020 tidak hanya cita-cita.

Hadirin yang saya hormati,

Kini sampailah pada bagian akhir dari pidato saya. Sungguh saya amat bersyukur kepada Allah, *alhamdulillah robbil alamin*, yang telah menunjukkan hidayah, rahmat, memberi ilmu, menunjukkan mana jalan hidup yang harus saya tempuh. Tanpa ijin dan ridho-Nya, serta bantuan banyak pihak, niscaya saya tidak mungkin berdiri di hadapan anda pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu. Tanpa menafikan yang tidak saya sebut namanya, saya akan menyebutkan sebagian dari mereka.

Terima kasih saya haturkan kepada yang terhormat Dekan, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat di Fakultas Ekonomi UGM dan di tingkat Universitas Gadjah Mada. Dr. Ainun Naim, Almarhum Dr. Masykur Wiratmo, dan Dr. Catur Sugiyanto, yang masing-masing selaku Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FE UGM, mengingatkan saya adanya “defisit” guru besar di jurusan Ilmu Ekonomi, sekaligus mendukung sepenuhnya pengusulan guru besar ini. Prof. Zaki Baridwan dan Prof. Basu Swasta Dharmesta amat

membantu dalam proses pengajuan guru besar saya masing-masing di tingkat fakultas dan universitas. Penghargaan yang tak ternilai saya sampaikan kepada Rektor UGM Prof. Dr. Sofian Effendi, MPA dan Ketua Majelis Guru Besar Prof. Dr. Ir Boma Wikan Tyoso, M.Sc. yang telah memberikan dukungan dan kemudahan sehingga tercapainya jabatan Guru Besar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Bambang Sudibyo, atas nama pemerintah Republik Indonesia yang telah mengangkat saya sebagai Guru Besar per 1 Oktober 2006.

Kepada para guru saya sejak dari TK Sang Timur, SDL Pangudi Luhur, SMP Pangudi Luhur, hingga SMA Kolose de Britto, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khusus saya haturkan kepada Pak Sabdono, Bruder Herman, Bu Yanti, dan Pak Tulus yang telah berkenan hadir hari ini. Guru-guru saya di SD dan SMP ini telah meletakkan dasar pendidikan yang penting bagi saya. Saya bersyukur mengenyam pendidikan di SMA Kolose de Britto yang menekankan “bebas tapi bertanggung jawab”, nikmatnya sekolah dengan kaos oblong dan sandal jepit, ikut memperkuat tim de Britto dalam Cerdas Cermat Antar SMA. Khusus Drs.Susilo Nugroho, yang dikenal sebagai “Denbaguse Ngarso”, saya berterima kasih karena “dobosan” bapaklah saya menjadi tertarik belajar ekonomi. Dengan gaya teaternya yang khas di kala mengajar, beliaulah yang pertama kali memperkenalkan “Dunia Ekonomi Kita” dan membuat saya “jatuh cinta” dengan ilmu ekonomi. Terima kasih saya haturkan kepada Pak Triantoro guru trigonometri yang mendorong saya untuk memilih Fakultas Ekonomi, juga Pak Sukadi dan Pak Hengky guru bahasa Indonesia yang mengajarkan bagaimana menulis dengan tata dan gaya bahasa yang menarik. Pengalaman menjadi koresponden majalah Tempo di Inggris membuat saya memahami bagaimana menulis agar “enak dibaca dan perlu”. Tidak pernah terbayangkan saat itu, saya menjadi penulis buku, yang kini berjumlah 15 judul.

Empat orang senior di FE UGM yang mewarnai kiprah saya untuk berkarya di bidang ilmu ekonomi, yaitu: Prof. Soelistyo almarhum, Prof. Mubyarto almarhum, Prof. Soekanto Reksohadiprodjo, dan Prof. Iswardono Sardjono Permono. Beliau berempatlah yang mengajak, mendorong, dan memberi surat

rekomendasi kepada saya untuk menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UGM. Prof. Soelistyo adalah dosen yang membimbing skripsi saya, mengoreksi dan mendorong mempublikasikannya di majalah Prisma, jurnal ilmiah yang amat bergengsi kala itu. Pengalaman mengajar Ekonomi Indonesia bersama Prof. Mubyarto, atau dikenal sebagai Pak Muby, ekonom senior yang tak kenal lelah memperjuangkan Ekonomi Pancasila, merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Bagi saya, Pak Muby telah memberikan teladan untuk produktif menulis buku, selalu memikirkan nasib “wong cilik”, dan mengingatkan saya untuk meneliti tidak dengan menggunakan model ekonomi yang abstrak. Prof. Soekanto adalah Dekan Fakultas Ekonomi kala itu yang banyak memberikan bekal mengajar dan mendorong untuk segera mengambil studi pascasarjana ke luar negeri.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Prof. Iswardono. Betapa tidak. Beliau tidak hanya mempercayai saya untuk menjadi asisten Ekonomi Mikro selama tiga tahun, namun juga mengajari bagaimana menulis buku untuk pertama kali. Bahkan ketika beliau mengambil program *sandwich* dalam rangka studi doctoral di Melbourne, beliau telah menerima saya sekeluarga yang *homeless* kala itu. Sungguh kami sekeluarga tidak pernah melupakan kehangatan dan kebaikan Mas Is, Mbak Nuri, Rena, dan Johan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu pembiayaan studi S3 saya di University of Melbourne, Australia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Melbourne Research Scholarships Office dan Faculty of Economics and Commerce, the University of Melbourne, untuk dukungan finansialnya selama studi penulis di salah satu universitas terbaik di negeri Kanguru. Bahkan Dekan Faculty of Economics and Commerce telah memberikan Special Dean Award di tengah-tengah krisis keuangan Asia, memberikan remisi biaya kuliah, dan mendukung sepenuhnya biaya perpanjangan studi saya hingga selesai. Penghargaan juga saya sampaikan kepada Prof. Nopirin, Dekan Fakultas Ekonomi saat itu, atas ijin dan dukungannya kepada saya untuk mengambil program doktor di Universitas Melbourne. Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada *Quality for Undergraduate Education* (QUE) Project, program studi manajemen, terutama kepada Prof. Marwan Asri, Dr. Agus Sartono, dan Prof.

Eduardus Tandelilin, atas dukungan biaya kuliah yang diberikan. Khusus untuk Prof. Ted dan istri, Mbak Nina, terima kasih atas dukungannya selama ini, bahkan beliaulah yang mengingatkan saya untuk jauh-jauh hari menyiapkan pidato pengukuhan ini.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Prof. Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi anggota Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, yang diketuai oleh Faisal Basri, MA. Sungguh suatu pengalaman yang amat berharga bekerjasama dengan anggota tim lainnya, yaitu: Dr. Arianto Patunru, Prof. Armida Alisyahbana, Agung Pambudi, Rachmat Gobel dan Chris Kanter. Kepada Tim Internal Menko Perekonomian, Dr. Jannes Hutagalung, Dr. M Ikhsan, dan Dr. Bayu Krisnamurti, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama satu tahun terakhir ini.

Penulis berterima kasih kepada para pejabat Pemda yang telah membuka wawasan yang berharga bagi penulis tentang otonomi dan pembangunan daerah. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Sri Sultan HB X (Gubernur DIY), Awang Faroek Ishak (Bupati Kutai Timur), Edward Azran (Ketua Bappeda Kab Kutai Timur), Ibnu Subiyanto (Bupati Sleman), Herry Zudianto (Walikota Yogyakarta) yang banyak menambah wawasan saya tentang “bagaimana membangun daerah di era otonomi”.

Kepada rekan-rekan pengurus ISEI, saya menyampaikan terima kasih atas dorongan dan kerjasamanya. Saya berterima kasih kepada Dr. Burhanuddin Abdullah, Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI, dan Prof. Edy Suandi Hamid, Ketua ISEI cabang Yogyakarta. Prof. Edy, dalam pidato pengukuhan guru besarnya tanggal 7 Mei 2005, berkeyakinan bahwa saya akan terpacu untuk mengikuti jejaknya. Keyakinan yang alhamdulillah benar-benar terealisasi hari ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong dan memberikan pengalaman penelitian. Khususnya kepada Prof. Gunawan Sumodingrat dan Prof. Dibyo Prabowo, saya mendapatkan pengalaman riset yang luar biasa tentang petani dan industri gula Indonesia. Prof. Afan Gaffar almarhum, Dr. Pratikno, Cornelis Lay, MA, dan Prof. Mardiasmo, menambah wawasan saya mengenai otonomi daerah, pengembangan Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu dan Batam. Bersama tim peneliti LPEM-FEUI dan JICA, dengan ketua Prof. Shinji Asanuma dan Prof. Bambang Brodjonegoro, saya ikut mengkaji bagaimana implementasi otonomi daerah di Indonesia selama 2001-2004. Rekan-rekan peneliti, khususnya Dr. Raksaka Mahi dan Dr. Robert Simanjuntak, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran anda hari ini.

Saya bersyukur bertemu dengan dua orang yang membuat saya mengenal dan mempelajari Islam lebih mendalam. Pertama, Drs. Mufti Abu Yasid adalah guru ngaji saya saat masih sekolah di SMA De Britto. Beliaulah yang mendukung pengajian bagi kami siswa di sekolah nonmuslim se-Jogja dan menyelenggarakan sholat Jumat jam 13.30 di kampus UII Jl Cik Di Tiro. Kedua, KH Umarul Yahya Al Farouk, tidak hanya menyembuhkan kami sekeluarga, namun juga mengajarkan kekuatan zikir dalam mengobati segala penyakit dan pentingnya mujahadah untuk menjaga iman.

Perkenankan saya juga mengucapkan terima kasih kepada banyak kerabat, keluarga, dan sahabat yang banyak membantu pada saat saya dan keluarga berada di Inggris, Melbourne, maupun Indonesia. Saya tidak pernah melupakan kebaikan keluarga Oom Marsma (Purn) Aulia Soeratno, Bude Susilah Sudjono, Mbak Lilis & Mas Chandra, Pakde Drs. Suhodo, dan Bude Haryono ketika penulis “merantau” di Jakarta sehabis lulus S1. Pakde dan Bude Prof. Soepadyo Mangunsukardjo memberikan “sangu” hidup yang luar biasa bagi kami sekeluarga. Saya tidak akan melupakan Dr. Bagus Santoso dan Dr. Samsubar Saleh, teman senasib di Birmingham, yang ngajari bagaimana memasak saat ngambil Master di Inggris. Saya selalu mengingat kebaikan dan keramahan Mas Dr. Hargo Utomo & keluarga selama *indekost* di Canberra. Saya selalu ingat dengan Mas Wihana Kirana Jaya, PhD (cand) dan mbak Ushi, yang telah menemani saya di rumah East Coburg Melbourne dan memberikan dukungan penuh selama bulan dan detik-detik terakhir sebelum *submit* disertasi ke dewan penguji. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Wahid Supriyadi Konsul Jenderal RI di Melbourne dan seluruh rekan di Melbourne Discussion atas diskusi dengan berbagai topik yang menarik. Sobat saya, Dr. Setio Anggoro Dewo, Dr. Muhammad Syafii Antonio, dan Dr. M. Syafii Anwar telah memberikan dukungan moril yang sangat bernilai di saat kritis

mengerjakan disertasi. Terima kasih juga kepada keluarga Mas Dr. Lukito Nugroho, Mas Amin Wibowo, MBA, Mbak Sari Sitalaksmi, MBA, Mas Edhie Purnawan, MA, yang telah membuat kenangan yang tak terlupakan selama kami tinggal di Melbourne. Khusus kepada keluarga Mas Ade Budi Kurniawan, M.Si, terima kasih atas waktu yang disisihkan untuk membantu pindahan di Melbourne, juga membaca dan memberi komentar yang konstruktif atas naskah pidato ini.

Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada semua asisten dan mantan asisten saya, yang telah membantu dalam menulis 15 buku dan ratusan artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan tersebar di berbagai koran/majalah. Saya juga berterima kasih kepada para penerbit buku-buku saya, terutama Penerbit Andi, Erlangga, UPP STIM YKPN, dan BPFE. Kepada redaktur Kompas, terutama Mbak Sri Hartati Samhadi dan Mas Suryopratomo, redaktur Kedaulatan Rakyat, khususnya Mas Ronny Sugiantoro dan Mbak Niniek Fadmi, atas kerjasamanya selama ini. Redaktur Majalah Gatra, mas Widi Yarmanto, dan redaktur Tempo, Mas Bambang Harimurti, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya terutama ketika saya menjadi koresponden Tempo di Inggris.

Saya juga mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada kakak-kakak dan adik-adik yang selalu mendukung apa yang saya lakukan. Secara khusus, terima kasih kepada keluarga adik-adik saya, Yudi Wasisto, MM, Dr. Sari Wahyuni, Pracoyo Budi Jatmiko, M.Si. Saya yakin dan mendoakan agar adik saya, Sari Wahyuni, terpacu untuk segera mengikuti jejak saya, tentunya di FE UI. Terima kasih juga kepada keluarga kakak-kakak saya, Ir. Ermansyah, Drs. Eddy Kusumayadie, Ir. Erwanto, dan Eryuna, yang mendoakan dan menyanakan kapan SK Guru Besarnya turun.

Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta, Erlina Juwita (Ita), yang telah banyak berkorban dan menjadi bagian penting dalam kehidupan saya. Saya mengenal Ita sejak masih kelas 3 SD, ditambah lebih dari 14 tahun mendampingi sebagai istri. Ia adalah teman diskusi, sekaligus *garwa (sigaring nyawa)* dalam mengarungi suka duka kehidupan di Jogja, Birmingham, dan Melbourne. Untuk anak-anakku— Sekar, Fiqhi, dan Tarisa— papa berterima kasih atas pengertian kalian setiap kali papa duduk di depan

komputer dan mulai menulis. Gelar guru besar ini adalah hasil kerja bareng kita.

Perkenankan saya menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua dan mertua. Suhartini, ibu saya yang selalu mendorong penulis untuk terus berkarya dan memanjatkan doa yang tiada henti, serta memperkenalkan strategi bisnis dan seni melayani pelanggan dalam bisnis “bunga” sejak penulis masih balita. Beliau juga menanamkan falsafah hidup yang penting, yaitu “jumangkah tekan tumandang dadi”, setiap usaha dimulai dari satu langkah, upayakan sampai tuntas, dan insya Allah menjadi yang terbaik. Kepada Suwarni Wardani, ibu mertua, saya menyampaikan *gunging panuwun* atas doa dan bantuannya dalam “membangun rumah”. Prof. Karmono Mangunsukardjo, bapak saya almarhum, telah memberikan banyak teladan dalam hidup. Rasanya baru kemarin saya dan adik saya mendampingi beliau dalam ujian terbuka untuk meraih gelar doktor ilmu geografi di Balai Senat ini. Saya yakin kedua orang tua dan mertua saya adalah orang yang paling bangga atas apa yang saya raih hari ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Akhir kata, saya selaku pribadi dan atas nama keluarga menyampaikan beribu terima kasih atas kehadiran dan kesabaran hadirin sekalian dalam mendengarkan pidato pengukuhan ini. Harapan dan doa saya, semoga guru besar ini, hanyalah salah satu terminal dalam kehidupan akademis saya dan baru merupakan awal dari pengabdian saya yang lebih intensif kepada dunia pendidikan, UGM, dan negara kita yang tercinta. Mohon doa para hadirin, setelah hari ini, semoga saya tidak berhenti berkarya, mampu membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, dan tetap produktif menulis. *Allahumma inni a'uudzubika min qalbin laa yakhsya'u, wa 'ilmin laa yanfa'u, wa du'aa 'in laa yusma'u, wa nafsini laa tasyba'u*. Artinya, Ya Allah, saya berlindung dari hati yang tidak khusyu, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar, dari diri yang tidak pernah kenyang. Semoga pidato ini ada manfaatnya dan memberi berkah bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh.

Lampiran

Tabel 1. Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha, 1968-2005

Lapangan Usaha	1968	1978	1983	1988	1993	1998	2000	2005
Pertanian	51,0	30,5	22,9	24,1	17,9	17,4	15,6	13,4
Pertambangan dan penggalian	4,2	17,6	20,8	12,1	9,6	8,3	12,1	10,4
Industri manufaktur	8,5	10,0	12,8	18,5	22,3	23,9	27,8	28,1
Lainnya ¹⁾	36,3	41,9	43,6	45,2	50,3	50,3	44,6	48,1
PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: ¹⁾ Lainnya terdiri atas sektor listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah, dan jasa-jasa

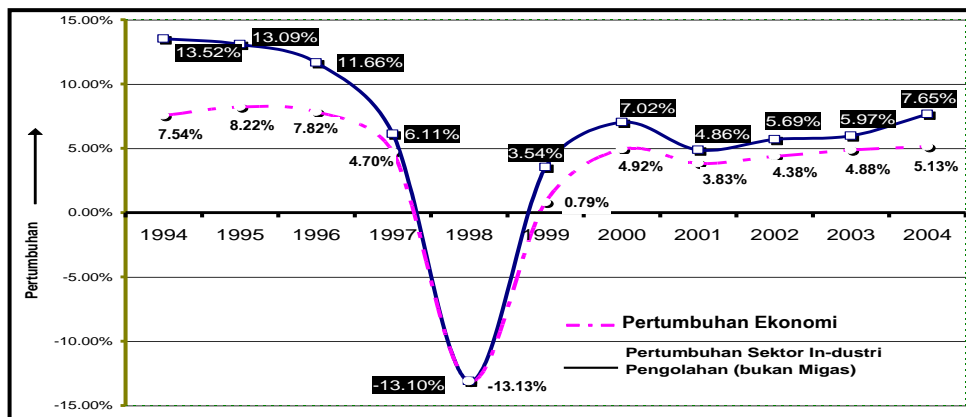
Sumber: BPS (2005: 97; 2006); Kuncoro (2006: 368)

Tabel 2. Peranan Industri Manufaktur dalam Ekspor Indonesia, 1994-2006 (juta dolar AS)

Komoditi ekspor	1994	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
Migas	9.694	7.872	14.37	12.64	12.1	13.65	15.6	19.2	24.7
Nonmigas	30.36	40.98	47.76	43.68	45.1	47.4	55.9	66.4	86.8
Total	40.05	48.85	62.12	56.32	57.2	61.05	71.6	85.7	111
<i>Memo Items:</i>									
% Industri Manufaktur terhadap nonmigas	84,65	84,41	87,95	86,24	85,9	86,2	87	84,2	83,1
% industri Manufaktur terhadap total ekspor	64,18	70,81	67,61	66,87	67,8	66,96	68	64,9	65

Catatan: * data sampai bulan Agustus

Sumber: Diolah dari BPS, *Indikator Ekonomi*, berbagai tahun



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Industri

Manufaktur, 1994-2004 (Departemen Perindustrian, 2006)

Tabel 3. Ekspor Nonmigas Menurut Kategori: Indonesia, 1994-2003 (%)

Kategori	1994	1997	2000	2001	2002	2003
HCI	11,9	13,7	11,7	12,4	13,4	13,8
TI	13,0	18,6	26,0	24,9	25,8	24,7
NRI	24,5	20,7	10,2	10,7	10,6	10,1
PCI	5,3	10,0	15,2	13,2	14,7	14,9
ULI	45,3	37,0	36,9	38,9	35,6	36,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nilai Ekspor (juta US \$)	20,516	22,454	36,448	31,977	31,323	31,645

Sumber: Dihitung dari BPS, *Trade Statistics*, berbagai tahun

Catatan: NRI: SITC 53, 63, 66 (except 664, 665, 666)

ULI: SITC 65, 664, 665, 666, 81-85, 89, (except 896, 897)

PCI: SITC 51, 52, 67, 71, 72, 73, and 75, 751

HCI: SITC 55, 62, 64, 69, 775, 78, 79, 885, 896, and 897

Tabel 4. Kontribusi masing-masing jenis Industri dalam Industri Manufaktur Indonesia, 1997-2002

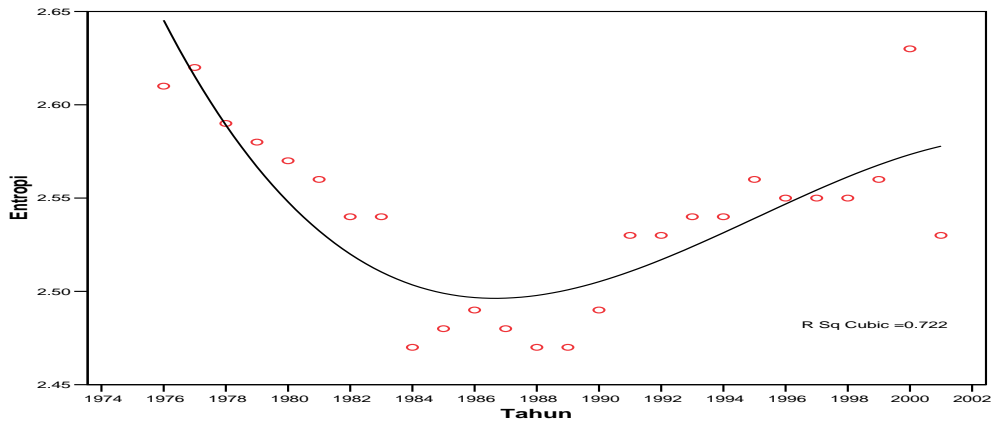
Jenis Industri	Unit Usaha									
	1997	%	2000	%	2001	%	2002	%	2004	%
IBM	22,386	0.8	22,174	0.8	21,396	0.8	21,438	0.8	20,685	0.8
IKRT	2,851,862	99.2	2,598,704	99.2	2,538,283	99.2	2,711,202	99.2	2,671,660	99.2
Total	2,874,248	100	2,620,878	100	2,559,679	100	2,732,640	100	2,692,345	100%
Jenis Industri	Tenaga Kerja									
	1997	%	2000	%	2001	%	2002	%	2004	%
IBM	4,170,093	39.6	4,366,816	41.0	4,385,923	41.8	4,394,587	40.7	4,324,979	39.7
IKRT	6,352,722	60.4	6,291,441	59.0	6,110,058	58.2	6,394,651	59.3	6,547,855	51.3
Total	10,522,815	100	10,658,257	100	10,495,981	100	10,789,238	100	10,872,834	100
Jenis Industri	Nilai Output (Milyar Rp)									
	1997	%	1998	%	2000	%	2001	%	2002	%
IBM	264,271	91.0	430,273	90.7	628,808	91.6	722,360	91.5	725,912	91.5
IKRT	26,170	9.0	44,151	9.3	57,319	8.4	67,091	8.5	67,532	8.5
Total	290,441	100	474,424	100	686,127	100	789,451	100	793,444	100

Sumber: BPS, <http://www.bps.go.id>, berbagai tahun.

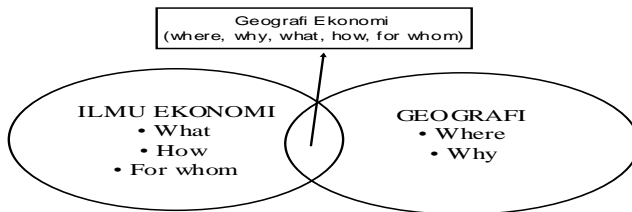
TABEL 5. Distribusi Tenaga Kerja IBM Menurut Pulau Utama (% dari total), 1976-2004

Pulau Utama	1976	1980	1985	1990	1995	1999	2002	2004
Sumatra	6.7	8.7	12.1	13.0	10.8	11.7	11.7	14.1
Jawa	89.1	85.8	78.6	78.0	82.2	81.1	81.3	79.0
Kalimantan	1.8	3.5	5.6	5.3	3.9	3.8	3.8	3.8
Sulawesi	0.9	1.0	1.7	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5
Pulau bagian Timur	1.5	1.0	1.9	2.2	1.8	1.9	1.7	0.9
INDONESIA	100	100	100	100	100	100	100	100

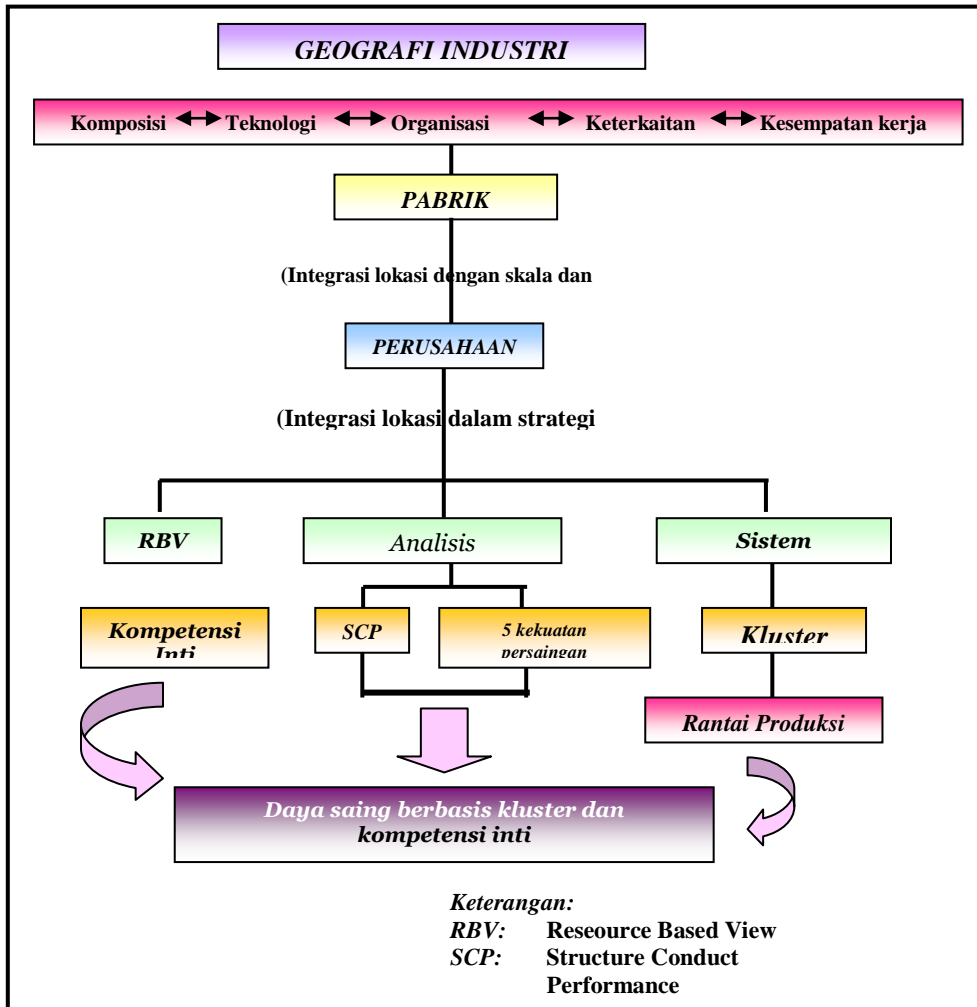
Sumber: Dihitung dari data mentah BPS, *Survei Industri Besar dan Sedang*, berbagai tahun



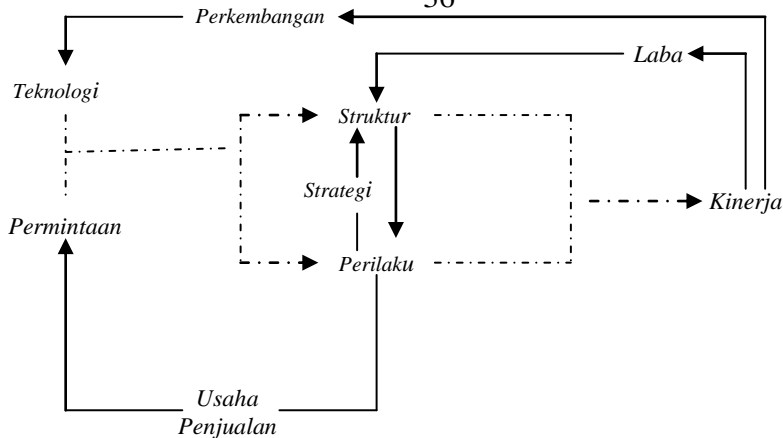
Gambar 2. Total Entropi dan Trennya: Indonesia, 1976-2001 (Kuncoro, 2004)



Gambar 3. Keterkaitan Ilmu Ekonomi dan Geografi



Gambar 4. Evolusi Kajian Ekonomika dan Geografi Industri
 Sumber: Disarikan dari Hayter (2000:9); Deperin (2006); Kuncoro (2006: Bab 2); Collis & Montgomery (1998)



Gambar 5. Hubungan Struktur – Perilaku – Kinerja (Martin, 1999:7)

Tabel 6. Visi dan Kebijakan Industri di Negara Asia Timur dan Tenggara

No	Negara	Visi	Kebijakan Industri
1	Malaysia	Visi Malaysia 2020 (<i>Second Industrial Master Plan</i>)	Menekankan pada kemampuan untuk menangani rancang bangun dan perekayasaan untuk membangun pabrik secara utuh, mengembangkan <i>advance material (advance composite material product and titanium product)</i> , and <i>advanced manufacturing technology</i>
2	Korea Selatan	Menjadi negara maju tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan industri besi baja, dengan bahan baku impor. b. Industri perkapalan. c. Industri elektronika. d. Industri otomotif
3	India	Menjadi bangsa maju pada tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Swa sembada pangan secara lestari (World Player dalam produk <i>carbohydrate</i>, seperti gandum, beras, dan pula sumber protein). b. Penekanan pada peranan UKM c. Menjadi produsen dunia dalam bidang material. d. <i>Aero space technology</i>. e. Memperkuat industri pertahanan dan keamanan.
4	China	Menjadi negara maju tahun 2050 (<i>mid level developed nation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Swa sembada pangan secara lestari b. Mengembangkan teknologi maju, termasuk <i>bio technology</i>. c. <i>Micro electronics</i> dan teknologi computer. d. Memanfaatkan sumber teknologi untuk sektor pertanian, industri kecil. e. <i>Advanced materials</i>. f. <i>Aero space technology</i> g. Pemanfaatan sumber energi dari luar China.

Sumber: Sastrosenarto (2006: 74-79)

Tabel 7. Pemantauan Implementasi Inpres No. 3/2006 Per 31 Desember 2006

	Jumlah Tindakan	Selesai	Ditunda	Berlanjut
Umum	19	14	1	4
Bea Cukai	17	7	2	8
Perpajakan	20	4	2	14
Ketenagakerjaan	19	6	4	9
UKMK	10	4	6	0
Total	85	35	15	35

Sumber: Boediono (2006)

DAFTAR PUSTAKA

- Aswicahyono, H., and Hill, H. 2004. 'Survey of Recent Development'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 40, No.3. December.
- Aswicahyono, H. 1996. 'Transformasi Industri: Makna dan Tantangan', dalam Pangestu, M., Atje, R., dan Mulyadi, J. (penyunting), *Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta. CSIS.
- BI, 2006. <http://www.bi.go.id>.
- BI, 2007. Laporan Perekonomian Indonesia 2006. Jakarta. Bank Indonesia.
- Balassa, B. 1965. Trade Liberalization and 'Revealed' Comparative Advantage. *The Manchester School of Economic and Social Studies*, 32, 99-123.
- Boediono (2006) *Macro Outlook and Progress on Structural Reforms. Presented in Update on Indonesian Economic Reform*, Jakarta, 18 December.
- BPS, 2005. Statistik Industri: Hasil Pengolahan Data Perusahaan Industri Besar Dan Sedang. Jakarta. BPS.
- BKPM, 2006. <http://www.bkpm.go.id>.
- Chenery, H. 1979. *Structural Change and Development Policy*. John Hopkins University Press, Baltimore.
- Chenery, H. & Moises Sirquin. 1975. *Patterns of Development, 1950-70*. Oxford University Press, London.
- Cowling, K. (ed.). 1999. *Industrial Policy in Europe: Theoretical Perspective and Practical Proposals*. Routledge. London and New York.
- CV Eko Jaya. 2007. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007*. CV Eko Jaya. Jakarta.
- Departemen Perindustrian, 2006. *Kebijakan Pembangunan Industri Nasional: 2004-2009*. Jakarta.
- Grant, W. (ed.). 1995. *Industrial Policy*. Edward Elgar Publishing Limited. Aldershot.
- GTZ, 2003. 'New Survey on Business Climate in the Regions'. *Decentralization News*. Issue No. 39. 34 January.
- Fujita, M., & Thisse, J.-F. 1996. *The Spatial Economy: Cities, Region, and International Trade*. Cambridge and London: The MIT Press.

- Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. 1999. *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. The MIT Press. Cambridge and London.
- Hill, H. 1997. *Indonesia's Industrial Transformation*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Hofman, B., Kai, K. and Gunther, G.S., 2003. Corruption and Decentralization. International Conference on 'Decentralization and Its Impact on Local Government and Society'. May 15-17.
- IMD. 2007. 'World Competitiveness Yearbook', http://www.imd.ch/research/centers/wcc/research_methodology.cfm. diakses 6 Maret.
- KPPOD, 2005. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Persepsi Dunia Usaha*. Jakarta.
- Krugman, P. 1991. *Geography and Trade*. Cambridge: MIT Press.
- Krugman, P. 1994. 'Competitiveness: A Dangerous Obsession'. *Foreign Affairs*, 73(2)(March/April).
- Krugman, P. 1995. *Development, Geography, and Economic Theory*. Cambridge and London: The MIT Press.
- Krugman, P. 1998. "Space: The Final Frontier". *Journal of Economic Perspectives*, 12(2): 161-74.
- Krugman, P. 1996. "Urban Concentration: The Role of Increasing Returns and Transport Costs". *International Regional Science Review*, 19(1&2): 5-30.
- Kuncoro, M. 1995. 'Desentralisasi Fiskal Di Indonesia: Dilema Otonomi Dan Ketergantungan'. *Prisma*, 4(April).
- Kuncoro, M. 2000, *The Economics of Industrial Agglomeration and Clustering, 1976-1996: the Case of Indonesia (Java)*, disertasi Ph.D, Department of Management, University of Melbourne, Melbourne, tidak dipublikasikan.
- Kuncoro, M. 2001. 'Regional Clustering of Indonesia's Manufacturing Industry: A Spatial Analysis with Geographic Information System (GIS)'. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 3(3).
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial Dan Regional: Studi Aglomerasi Dan Kluster Industri Indonesia*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*, Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2005. 'Industri Di Bawah Bayang-Bayang Krisis Jilid II', *Kompas*, 27 Agustus.
- Kuncoro, M. 2005. 'Menanti Reformasi Iklim Bisnis Di Indonesia', *Jurnal UNISIA*, no. 55/XXVIII.

- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, edisi ke-4*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2006. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2006. 'Reformasi Iklim Investasi Indonesia di Indonesia', *Kompas*, 4 Februari.
- Kuncoro, M. 2006. 'Revisi UU Ketenagakerjaan: Quo Vadis?', *Kompas*, 8 April.
- Kuncoro, M. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030?*. Andi, Yogyakarta.
- Kuncoro, M., Subarkah, J., Djatmiko, BA., Kusumo, P., Wardani, EM., Djani, RW., Supomo, IA. 2004, Domestic Regulatory Constraints to Labor Intensive Manufacturing Exports, *Report for GIAT-USAID*, Pusat Studi Asia Pasifik UGM. Yogyakarta.
- Kuncoro, Ari dan Isfandiarni. 2006. "Industrialization and Firm Survival in Indonesia". Makalah dipresentasikan dalam Kongres XVI ISEI "Meletakkan Kembali Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh", 1 Manado. 8-20 Juni.
- LPEM FEUI, 2000. *Construction of Regional Index of Cost of Doing Business in Indonesia*, Jakarta.
- LPEM FEUI & JETRO, 2003. *Impediments to Doing Business in Indonesia*. Jakarta.
- Lucas, R. E. 1998. On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22,3-22.
- Malo, M. 1995. *Social Sector Decentralization: The Case of Indonesia*. Available: <http://idrc.ca/socdev/pub/indones/Indonesia.html> [2002, 3 September].
- Ma, J., & Hofman, B., 2000. *Indonesia's Decentralization After Crisis (September)*. *The World Bank*. Available: <http://www1.worldbank.org/publicsector/premnote43.pdf> [2001, 1 February].
- Martin, R. 1999. The New 'Geographical Turn' In Economics: Some critical reflections. *Cambridge Journal of Economics*, 23, 65-91.
- Martin, R., & Sunley, P. 1996. *Paul Krugman's geographical economics and its implications for regional development theory: A critical assessment*. *Economic Geography*, 72(3), 259-.
- Ohmae, K. 1995. *The End of The State: The Rise of Regional Economies*. London: Haper Colins.
- Pack, H. 2000. *Industrial Policy: Growth Elixir or poison? The World Bank Research Observer*, 15(1), 47-67.

- Porter, M. E. 1985. *The Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance*, The Free Press, New York.
- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press. New York.
- Porter, M. E. & Orjan Solvell. 1998. "The Role of Geography in the Process of Innovation and the Sustainable Competitive Advantage of Firms". dalam Alfred D. Chandler, Jr., Peter Hagstrom, & Orjan Solvell (editors), *The Dynamic Firm: The Role of Technology, Strategy, Organization, and Regions*. Oxford: Oxford University Press.
- Porter, M. E. 1998. "Clusters and the New Economics of Competition". *Harvard Business Review*, November-December(6): 77-91.
- Prawiro, R. 1998. *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*. Oxford University Press. Oxford.
- SMERU, 1999. *Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah Dan Pelajaran Yang Diperoleh*. Desember.
- SMERU, 2001. *Regional Autonomy and the Business Climate: Three Kabupaten Case Studies from North Sumatran*, Jakarta, May (Mimeo).
- Sastrosoenarto, H., 2006. *Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian Dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*. PT. Shourcut Gagas Imaji. Jakarta.
- Soehoed, A. R. 1988. 'Reflections on industrialisation and Industrial Policy in Indonesia'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 24(2), 43-57.
- Soesastro, H. 1998. 'Daya saing Industri Indonesia'. *Dalam Perhimpunan Alumni Jerman, Daya Saing Industri Indonesia*. Jakarta.
- Suwandi, I M., 2003. Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Paper for Seminar on Reorientasi Implementasi Kewenangan Wajib Dan Standar Pelayanan Minimal Sebagai Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Daerah*, Mimeo, July 15-18, 2003, Jakarta.
- Rahayu, S.K., and Sumarto S., 2003. The Practice of Industrial Relations in Indonesia. *SMERU Working Paper*. March.
- Ray, D. 2003. Regulatory Reform and Local Government in Indonesia. Paper Presented at the 5th IRSA International Conference, 18-19th July. Bandung.
- Tambunan, T. 2001. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Theil, H. 1989. The Development of International Inequality, 1960-1985. *Journal of Econometrics*, 42, 145-55.
- Theil, H., & Chen, D. 1996. The Geographic Distribution of Gross World Product, 1950-1990. In H. Theil, D. Chen, K. Clements, & C. Moss (Eds.), *Studies in Global Econometrics* (pp. 7-46). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
- World Bank (WB). 2003. *Indonesia Maintaining Stability, Deepening Reforms*. Jakarta.
- WB. 2006. *Doing Business in 2006: Creating Jobs*. <http://rru.worldbank.org/Discussions/Topics/Topic68.aspx>. diakses tanggal 6 Maret 2007.
- WB. 2007. *Doing Business 2007*. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:21048259~isCURL:Y~menuPK:287091~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:226309,00.html>. diakses tanggal 6 Maret 2007.
- World Economic Forum. 2006. *Global Competitiveness Report*. <http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm>. diakses tanggal 6 Maret 2007.
- Yudhoyono, S. B. 2004. *Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik Dan Good Governance*. Brighten Press. Jakarta.

BIODATA



Nama: Mudrajad Kuncoro
 Tempat/tgl. Lahir: Yogyakarta, 4 September 1965
 NIP/Karpeg : 131963561/G. 036511
 Pangkat/golongan: Pembina, IVa
 Alamat Kantor: Fakultas Ekonomi UGM,
 Lantai II Sayap Barat,
 Bulaksumur, Yogyakarta
 55281

Alamat Rumah: Jl. Kaliurang KM 14, Gang Banteng, Nganggrung RT
 01/RW 30, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman 55581

Telp/Fax: (0274) 895734

Web site: <http://www.mudrajad.com>

Email : mudrajad@psekp.ugm.ac.id

Istri: Erlina Juwita, BA, Akt.

Anak :

1. Alfatania Sekar Ismaya
2. Dwiana Fiqhi Cahyani
3. Tarisa Galih Charity

Riwayat Pendidikan

- 2001 Doctor of Philosophy, Department of Management, dengan spesialisasi Bisnis & Ekonomi Regional, University of Melbourne, Melbourne, Australia, dengan disertasi berjudul "The Economics of Industrial Agglomeration and Clustering, 1976-1996: The Case of Indonesia (Java)"
- 1993 Master of Social Science, dengan spesialisasi Development Finance, University of Birmingham, Inggris, dengan thesis berjudul "Financial Liberalization in Chile and Indonesia: A Comparative Study".
- 1992 Graduate Diploma in Development Finance (Local Government Sector), Department of Accounting and Finance, University of Birmingham, Inggris.
- 1989 Sarjana Ekonomi (cum laude), Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta

- 1984 SMA Kolose de Britto, Yogyakarta
1981 SMP Pangudi Luhur, Yogyakarta
1977 SD Pangudi Luhur, Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan

- Staf pengajar Fakultas Ekonomi UGM (1989-sekarang)
- Anggota Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2006-sekarang)
- Anggota Tim Penyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Periode 2010-2015 (2006-2007)
- Wakil Ketua KP3EYobangkit (Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Yogyakarta) (2006-2007)
- Tim Ahli Ekonomi, Pusat Studi Asia Pasifik UGM (2006-2007)
- Koordinator Ahli Bidang Ekonomi Regional Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM (2005-sekarang)
- Komisaris PT Anindya Mitra Internasional, BUMD Milik Pemda Propinsi DIY (2004-2007)
- Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM (2002-2005)
- Staf peneliti pada CREAM (Corporate Real Estate Asset Management) Project, University of Melbourne, Australia (1998-2000)
- Tutor, asisten profesor, di Department of Management, University of Melbourne (1997-2000)
- Kepala Divisi Industri dan Energi, Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi, UGM (1994-1997)
- Koresponden Majalah Tempo di Inggris (1991-1993)
- Dosen STIE Perbanas Jakarta (1989)
- Asisten Dosen FE UGM, STIE YKPN, AA YKPN, dan AMP YKPN (1986-1989).

Konsultansi

- Konsultan PT Toyota Astra Motor (2005-2007)
- Konsultan ahli ekonomi bagi Setiawan Djody (2003)
- Konsultan Ahli Ekonomi Perkotaan untuk Penyusunan Masukan Teknis Pengembangan Kebijakan dan Perencanaan P2KP, Bappenas (2003)
- Individual Expert, PT Pelabuhan Indonesia II tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Ekonomi Makro dalam rangka Penyusunan Rencana Jangka Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (2003).
- Konsultan Pemerintah Daerah: Kabupaten Dompu (NTB), Kabupaten

Ende (NTT), Kabupaten Nabire (Papua), Kabupaten Sleman, Propinsi DIY, Kutai Timur dan Kutai Barat (Kaltim)

- Konsultan Multi Area Conindo, Jakarta (2002)
- Konsultan Pengusaha Kecil pada Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, UGM, Yogyakarta (1994-1996)
- Konsultan Keuangan Daerah pada PT Endaprosindo, Jakarta (1994)

Bidang Minat Penelitian

- Ekonomika Regional
- Ekonomika Industri
- Pembangunan Daerah
- Strategi Bisnis

Penghargaan (Award), a.l.:

- Instruktur terbaik ketiga pada Workshop Mata Kuliah International Finance Tahun 2003 oleh Penelitian dan Pengembangan Manajemen (PPM) FE UGM, Desember 2003.
- Teaching and Lecture Notes Awards dari QUE (Quality for Undergraduate Education) Economics, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2001.
- Grant dari dari QUE (Quality for Undergraduate Education) Project, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999-2000.
- Special Dean Scholarship, Faculty of Economics and Commerce, University of Melbourne, 1998.
- National Visiting Scholarship, the Australian National University, Canberra, 1998.
- Melbourne Research Scholarships, 1997-2000.
- Finalis Pemilihan Peneliti Muda Indonesia 1994 dan 1995, LIPI-TVRI-Depdikbud-Menristek, Jakarta.
- Scholarship, Overseas Development Administration (TCTD), Inggris, 1991-1993.
- Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah bidang Ilmu Sosial (LKTI) untuk Wilayah B (DKI Jaya, Jabar, Jateng, DIY), Solo, Januari 1988.
- Juara I Lomba Cerdas Cermat antar SMA se DIY dan Jawa Tengah, 1983.

Dosen Tamu

2000-2007	Manajemen Strategik (Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
2000-2006	Manajemen Keuangan Internasional, Manajemen Strategik, Etika Bisnis Islam (Magister Manajemen, Universitas Islam Indonesia)
2000-2004	Manajemen Strategik, Metode Riset (Program Doktor, Universitas Islam Indonesia)
2002	University of Groningen
2001	University of Leiden
1997-2000	Urban Development (Faculty of Economics & Commerce, University of Melbourne)

Keanggotaan dalam Jurnal Akademik

- Anggota Dewan Redaksi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI) (1989-1991; 2000-2004).
- Editor Ahli Jurnal Ekonomi Pembangunan (1996-sekarang).
- Anggota Dewan Editor Jurnal Kebijakan Ekonomi (2005-sekarang).
- Pemimpin Redaksi JEBI (2004-2007).
- Anggota Dewan Redaksi Jurnal Akuntansi, Manajemen, Ekonomi (2001-sekarang).

Keterlibatan Dalam Asosiasi Ilmiah

- Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Cabang Yogyakarta dan Pengurus ISEI Pusat.
- Pengurus IRSA (Indonesian Regional Science Association).
- Anggota Regional Studies Association (RSA).
- Anggota Academy of International Business (AIB).
- Anggota Australia-New Zealand International Business Academy (ANZIBA).

Penelitian, a.l.:

1. “Peluang, Tantangan Dan Hambatan Pengembangan Ekspor Diy: Sebelum Dan Setelah Gempa”, *kerjasama PPE FE UGM & Kantor Bank Indonesia Yogyakarta*, 2006.
2. “Pengembangan Model Pasar Kendaraan Roda Empat di Indonesia, kerjasama Pusat Studi Asia Pasifik dan PT Toyota Astra Motor, 2005-2007.

3. "Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2010", *Kerjasama Disperindagkop DIY dengan CV. Sentra Inti Pratama*. 2005.
4. "Regional Development of Kabupaten Sleman in the Autonomy Era: Policy Analysis and Implications for Medium-term Planning", *competitive grant, disponsori OSI-LPEM UI*, 2004
5. "Domestic Regulatory Constraints of Labor-Intensive Manufacturing Industry", *kerjasama Pusat Studi Asia Pasific dengan GIAT-USAID*, 2004.
6. "Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan (KAPET) Di Kawasan Timur" *Indonesia, penelitian Hibah Bersaing, Dirjen Dikti*, 2003-2004
7. "Indonesian-Japanese Joint Study on "Indonesia's Decentralization Policy: Problems and Policy Directions", *disponsori oleh Japan International Cooperation Agency (JICA)*, 2002-2003.
8. "Penyusunan Konsep Pengembangan Fundamental Ekonomi Daerah", *kerjasama Pusat Kajian Kebijakan Strategik Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia*, 2002.
9. "Analisis Pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) di Kawasan Timur Indonesia", *disponsori oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI*, 2002.
10. "Analisis Spasial Industri Manufaktur *Indonesia*, 1976-1999", *disponsori oleh QUE Economics-World Bank Project Grant*, 2002
11. "Repositioning Batam Industrial Development Agency, *kerjasama CIBS and Office of President Megawati*, 2001.
12. "Identifikasi dan Pengembangan Industri Di DIY", *kerjasama Penelitian dan Pengembangan Ekonomi FE UGM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY*, 2001.
13. "Identifikasi Profil dan Kluster Usaha Kecil: Analisis Subsektor dan Sebaran Geografis di Yogyakarta", 2001.
14. "Pangsa Pasar dan Daya Saing Produk Ekspor Nonmigas Indonesia di Victoria dan Tasmania", *disponsori Konsulat Jenderal RI Melbourne*, 2000.

Publikasi Buku:

1. Kuncoro, M. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri 2030*. Andi, Yogyakarta.
2. Kuncoro, M. 2007. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. edisi ke-3.

3. Kuncoro, M. 2007. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, edisi ke-2.
4. Kuncoro, M. 2006. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?* Erlangga, Jakarta
5. Kuncoro, M. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, edisi ke-4.
6. Kuncoro, M. 2005. *Metode Riset Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Erlangga, Jakarta, edisi ke-2.
7. Sugiyanto, C. dan Kuncoro, M. (eds). 2005. *Regional Development in Transition: Governance, Public Services and Eco-Tourism*. PSEKP UGM, Yogyakarta.
8. Kuncoro, M. 2004. *Ekonomi Pembangunan II*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
9. Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
10. Suhardjono dan Kuncoro, M dan. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE, Yogyakarta
11. Kuncoro, M. 2001. *Manajemen Keuangan Internasional: Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*. BPFE, Yogyakarta, edisi ke-2.
12. Kuncoro, M. Adji, A, dan Pradiptyo, R 1997. *Ekonomi Industri: Teori, Kebijakan, dan Studi Empris di Indonesia*. PT Widya Sarana Informatika, Yogyakarta
13. Sumodiningrat, G. dan Kuncoro, M. 1991. *Ekonomi Pertanian: Perkembangan dan Peranan Modeling*. PAU Studi Ekonomi UI, Jakarta.
14. Permono, I.S. dan Kuncoro, M. 1988. *Ekonomi Mikro*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Publikasi Buku dalam *Edited Book*

1. Kuncoro, M. 2005. “Desentralisasi Sekedar Alat”, dalam Gunawan, J., Yunanto, E.S., Birowo, A. dan Purwanto, B. (eds), *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal (Decentralization, Globalization & Democracy)*. LP3ES, Jakarta.
2. Kuncoro, M. 2004. “Indonesia’S Clove Cigarette Industry: SCP and Cluster Analysis”, dalam Alisjahbana, A.S. dan Brodjonegoro, Bambang P.S. (eds), *Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Poverty, and the Environmet*. IRSA, Unpad Press, Bandung.

3. Kuncoro, M. 2004. "Kata Pengantar", dalam Wahyuddin, M. (eds), *Industri dan Orientasi Ekspor: Dinamika dan Analisis Spasial*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
4. Dowling, J.M. dan Kuncoro, M. 2004. "The Dynamics and Causes of Agglomeration: An Empirical Study of Java, Indonesia" dalam Ruffini Pierre B. (eds). *Economic Integration and Multinational Investment Behaviour (European and East Asian Experiences)*. Edward Elgar Publishing, Inc. USA
5. Kuncoro, M. 2004. "Manajemen Pelayanan Publik" dalam Amirudin, dan Ruhyanto, Ari. (eds), *Mengelola Dinamika Politik Dan Sumber Daya Daerah*. PLOD-Departemen Dalam Negeri.
6. Kuncoro, M. 2002. "Kata Pengantar", dalam Muhammad (eds), *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Artikel dalam Jurnal, a.l.:

1. Kuncoro, M. 2006. "Aglomerasi Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Unisia*, Januari-Maret.
2. Widiati, R. dan Kuncoro, M. 2006. "Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia, Tahun 1996 dan 2001: Pendekatan Kluster dan SCP". *Jurnal Sosiosains*, Vol 19, No. 1
3. Pramana, A.A. dan Kuncoro, M. 2005. "Lokasi Kawasan dan Daya Saing Ekowisata di Propinsi Bali, 2004-2005." *Jurnal Empirika*, Volume 18, No. 2.
4. Salamun, A. dan Kuncoro, M. 2005. "Analisis Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Elektronika Indonesia 1990-1999". *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol 1, No. 2
5. Kuncoro, M. 2005. "Peta dan Prospek Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia". *Kompak*, edisi Januari-April.
6. Kuncoro, M. 2005. "Agglomeration Externalities Within Metropolitan Region: An Input-Output Analysis of Jabotabek and Singapore". *The Journal of Accounting, Management, and Economics Research*, vol 5, No. 1.
7. Kuncoro, M. 2005. "Mampukah KAPET Mempercepat Pembangunan Kawasan Timur Indonesia?". *Lintasan Ekonomi*, vol XXII, No. 1.
8. Kuncoro, M. 2004. "Adakah Perubahan Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Di Indonesia, 1976-2001?". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, vol 19, No. 4.
9. Kuncoro, M. 2004. "Shopping Center Locations And Their Influence On Land Prices in Surabaya: GIS Analysis And Panel Data 1996-2001".

- The Journal of Accounting, Management, and Economic Research*, vol 4, No 1,
10. Inayah , H. dan Kuncoro, M. 2003. “Adakah Pengaruh Pernyataan Presiden Gus Dur terhadap Perilaku Kurs Rp/US\$, 1 Januari 1999- 30 April 2002?: Studi Empiris dengan Metode Box Jenkins (ARIMA)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, volume 18, No.4
 11. Supomo, I.A. dan Kuncoro, M. 2003. “Analisis Formasi Keterkaitan, Pola Kluster, dan Orientasi Pasar: Studi Kasus Sentra Industri Keramik Kasongan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta”. *Jurnal Empirika*, volume 16, No.1
 12. Sodik, J. dan Kuncoro, M. 2003. “Upah Regional Industri Manufaktur Studi Kasus Di Sumatera 1979-1999”. *Jurnal Sosiohumanika*, volume 16A, No.2.
 13. Kuncoro, M. 2003. ”Why Manufacturing Industry Persisted to Cluster Spatially in Java?”. *Gadjah Mada International Journal of Business*, volume 5, No. 2.
 14. Kuncoro, M. 2003. Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek : Indonesia, 1996 – 1999”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, volume 18, No. 1.
 15. Kuncoro, M. 2003. ”Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, volume 11, No. 1.
 16. Kuncoro, M. 2002. ”Nasionalisme Ekonomi di Tengah Persaingan Global”. *Media Ekonomi*, volume 12, No. 19
 17. Arifin, Z. dan Kuncoro, M. 2002. ”Konsentrasi Spasial dan Dinamika Pertumbuhan Industri Manufaktur di Jawa Timur. *Jurnal Empirika*, volume 11, No.1.
 18. Kuncoro, M. 2002. ”Analisis Kurs Valas Dengan Pendekatan Box-Jenkins: Studi Empiris Rp/US\$ dan Rp/Yen, 1983.2-2000.3”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, volume 7, No.1.
 19. Kuncoro, M. 2002. ”Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, volume 17, No. 1.
 20. Kuncoro, M. 2001. “Regional Clustering Of Indonesia’s Manufacturing Industry: A Spatial Analysis with Geographic Information System (GIS)”. *Gadjah Mada International Journal of Business*, volume.3, No.3
 21. Kuncoro, M. 2001. “Tinjauan Buku: Membangun Sistem Ekonomi (Mubyarto: 2000)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, volume 16, No. 1.

22. Kuncoro, M. 2000. "Beyond Agglomeration and Urbanization". *Gadjah Mada International Journal of Business*, volume 2, No. 3.
23. Kuncoro, M. 1997. "Pengembangan Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil: Suatu Studi Kasus di Kalimantan Timur". *Analisis CSIS*, Januari-Februari.
24. Kuncoro, M. 1996. "Pembangunan Regional di Indonesia: Beberapa Catatan Menjelang Abad Ke-21". *Unisia*, No. 31.
25. Kuncoro, M. 1996. "The Nature and Impacts of Financial Reforms: Some Lessons from Chile and Indonesia". *Indonesian Economic Journal*, No. 7.
26. Kuncoro, M. 1996. "Struktur dan Kinerja Ekonomi Indonesia Setelah 50 tahun Merdeka". *Jurnal Ekonomi*, tahun II, vol.7.
27. Kuncoro, M. 1996. "Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Agroindustri Indonesia: Suatu Catatan Empiris". *Kelola (Gadjah Mada University Business Review)*, No.11/VI.
28. Kuncoro, M. 1995. "Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan". *Prisma*, No. 4, Tahun XXIV.
29. Kuncoro, M. 1995. "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi". *Kelola (Gadjah Mada University Business Review)*, No.10/IV.
30. Kuncoro, M. 1994. "Dilema Utang Luar Negeri Menjelang Tahun 2000". *Jurnal Ekonomi*, Th. I Vol.4
31. Kuncoro, M. 1994. "Purchasing Power-Parity: Its Nature, Deviations, and Implications for International Financial Management". *Kelola (Gadjah Mada University Business Review)*, No.7/III.
32. Kuncoro, M. 1994. "Quest for Monetary and Financial Reforms in Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.9, no.1
33. Kuncoro, M. 1994. "Deregulasi Perbankan di Indonesia: Tinjauan dan Implikasinya Bagi PJP II". *Prisma*, No.2, Februari
34. Kuncoro, M. 1994. "Structural Adjustment in Indonesia: A Survey of Recent Development". *Kelola Gadjah Mada University Business Review*, No.5/III/Januari.
35. Kuncoro, M. 1993. "The Political Economy of Decentralisation in Indonesia: towards Cultivating the Grass-Roots". *The Indonesian Quarterly*, volumr XXI, no. 3, third quarter.
36. Kuncoro, M. 1993. "Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan". *Analisis CSIS*, tahun XXII, no.2, Maret-April.
37. Kuncoro, M. 1993. "A Quest for Structural Adjustment: The Malaysian Experience". *The Indonesian Quarterly*, second quarter

Seminar dan Konferensi, a.l.:

1. “Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia” dipresentasikan dalam Konggres ISEI XVI, Manado, 19-20 Juni 2006.
2. “Percepatan Pembangunan Daerah” dipresentasikan dalam Seminar & Diskusi Terfokus Sektor Jasa Sebagai Motor Pembangunan Ekonomi Daerah, Denpasar-Bali, 18 Mei 2006.
3. “Impacts Of Foreign Direct Investments On Industrial Agglomeration: The Case Of Java, Indonesia”, presented in The ANZIBA ([Australia and New Zealand International Business Academy](#)) 2005 Conference, Melbourne, 9-11 November 2005.
4. “Grease Money and Regulatory Constraints to Manufacturing Exports: An Empirical Study and Suggested Reforms” presented in International Seminar: Toward A New Indonesia, Yogyakarta, 16-17 September 2005.
5. “Beyond Industrial Districts: An Evidence from Small and Cottage Industries in Java, Indonesia” presented in International Conference: Regional Growth Agenda, University of Aalborg, Aalborg, Denmark, 28-31 Mei 2005
6. “Domestic Regulatory Constraints to Labor-Intensive Manufacturing Exports” presented in The 6th IRSA (Indonesia Regional Science Association) on Regional Development in Transition: Governance, Public Services and Eco-Tourism, 13-14 Agustus 2004.
7. “The Role of Local Government: A Survey of Recent Development” presented in International Symposium on “Indonesia’s Decentralization Policy: Problems & Policy Direction”, Jakarta, 4-5 September 2003.
8. “Indonesia’s Clove Cigarette Industry: SCP And Cluster Analysis”, (with Simon Bambang Sumarno) presented in The 5th IRSA (Indonesia Regional Science Association) on Regional Development in a Decentralized Era : Public Services, Poverty, and the Environment, Bandung, 18 -19 Juli 2003.
9. “Is Kapet Effective to Boost Indonesia Eastern Regions?” presented in The 5th IRSA (Indonesia Regional Science Association) on Regional Development in a Decentralized Era : Public Services, Poverty, and the Environment, Bandung, 18 -19 Juli 2003.
10. “A New Resource-Rich District and Pioneer of E-Government: The Case of Kutai Timur” presented in International Conference on Decentralization and Its Impact On Local Economy and Society, Leiden University & PSAP, Jogjakarta, May 15-17, 2003
11. “A Quest For Industrial Districts: An Empirical Study of Manufacturing Industries in Java” presented in International workshop organised by the. N.W. Posthumus Institute for Economic and Social History on the

- theme Economic Growth and Institutional Change in Indonesia during the 19th and 20th Centuries, Amsterdam, Belanda, 25-26 February 2002.
12. "Spatial dynamics of industrial districts: An empirical study of manufacturing industries in Java, Indonesia" presented in Les Troisiemes Journees De La Proximite (The Third Congress On Proximity), "Nouvelles Croissances et Territoires / New Growth and Territories", Paris, Perancis, 13 and 14 December 2001.
 13. "The Dynamics and Causes of Agglomeration: An Empirical Study of Java, Indonesia" presented in International conference on "Location of Economic Activity, Regional Development and the Global Economy", University of Le Havre, Le Havre, Perancis, 26-27 September 2001.
 14. "Mengkaji Ulang Strategi Pembangunan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah dan Globalisasi" dipresentasikan dalam Seminar Nasional Etika dan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Otonomi Daerah, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 1 September 2001.
 15. "Unequal Geographic Distribution of Manufacturing Activity in Indonesia and Its Impacts on Regional Development", presented in Asian Studies Association of Australia 13th Biennial Conference, The University of Melbourne, A paper in Asian Studies Association of Australia 13th Biennial Conference, The University of Melbourne, Australia, 3-5 Juli 2000.
 16. "Trade Liberalisation and the Geographic Distribution of Manufacturing Activities: The Trends in Indonesia's Regional Manufacturing", presented in ANZIBA (Australia-New Zealand International Business Academy) Conference, University of New South Wales, Sydney, 1976-1995 Oktober 1999.
 17. "The Dynamic of Industrial Agglomeration in Indonesia and Java" presented in PhD Seminar Series, Department of Economics, Research School of Pacific & Asian Studies, Australian National University, Canberra, Agustus 1998.